



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB

SK KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR W6-A5/1468/HM.02.1/XII/2019



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB

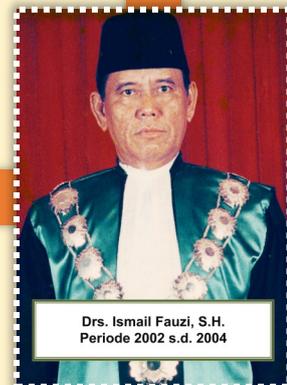
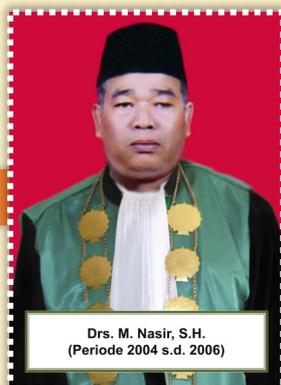
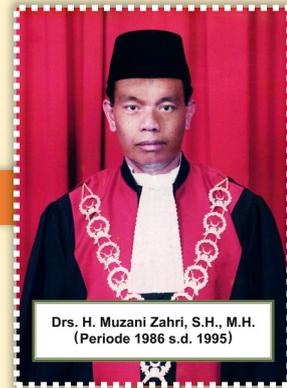
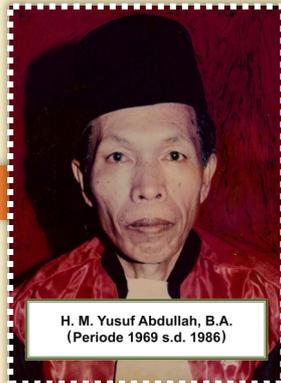
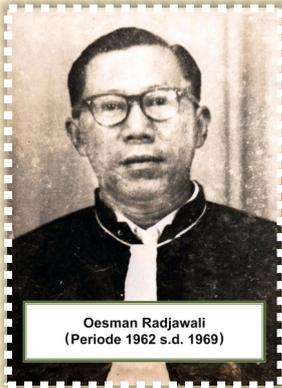
Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No. 1,
Muara Enim, Kode Pos - 31312
Telepon : 0734 - 7420107

Email : pamuaraenim@gmail.com
Web : www.pa-muaraenim.go.id
Fax : 0734 - 7420108



Ketua Sebelumnya

dari Tahun 1962 sampai Sekarang





Visi dan Misi

VISI

" Mewujudkan Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung "

MISI

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Transparan
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan yang profesional
3. Melaksanakan Tertib Administrasi dan manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien
4. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku



Profil Ketua

KETUA PA. MUARA ENIM

Drs. H. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H.

NIP	: 196909301994031002
Tempat	: Paringgonan, 30 September 1969
Pendidikan	: Strata 2 (S-2)
Pangkat	: Pembina Utama Muda
Golongan Ruang	: IV/c
Jabatan	: Ketua Pengadilan Agama Muara Enim / Hakim Madya Utama
Tamat	Jenjang Pendidikan
Tahun 1982	: 1. SD Negeri No. 142941 Paringgonan
Tahun 1985	: 2. MTs Nahdlatul Ulama Paringgonan
Tahun 1988	: 3. MA Nahdlatul Ulama Paringgonan
Tahun 1993	: 4. S-1 Syariah UIN Sulthan Syarif Kasim Riau
Tahun 2006	: 5. S-2 Hukum Universitas Muhammadiyah Medan
Masa Jabatan	Jabatan
TMT 20/10/2017	: 1. Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB
TMT 22/08/2016	: 2. Ketua Pengadilan Agama muara Enim Kelas II
TMT 30/11/2012	: 3. Wakil Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Kelas II
TMT 20/04/2007	: 4. Hakim Pengadilan Agama Sibolga Kelas II
TMT 27/06/2002	: 5. Hakim Pengadilan Agama Pandan Kelas II
TMT 01/05/1999	: 6. Hakim Pengadilan Agama Gunung Sitoli Kelas II
TMT 01/06/1995	: 7. PNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Gunung Sitoli Kelas II
TMT 01/04/1994	: 8. CPNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Gunung Sitoli Kelas II



Profil Wakil

WAKIL KETUA PA. MUARA ENIM ENIM

Drs. HUSAINI, S.H., M.H.

NIP	: 196812191994031001
Tempat	: Tapak Tuan, 19 Desember 1968
Pendidikan	: Strata 2 (S-2)
Pangkat	: Pembina Utama Muda
Golongan Ruang	: IV/c
Jabatan	: Waka Pengadilan Agama Muara Enim / Hakim Madya Utama
Tamat	Jenjang Pendidikan
Tahun 1982	: 1. SD Negeri 1 Labuhan Haji
Tahun 1985	: 2. MTs Pesantren Persatuan Islam Bangil
Tahun 1988	: 3. MA Pesantren Persatuan Islam Bangil
Tahun 1993	: 4. S-1 IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
Tahun 2004	: 5. S-1 Hukum Universitas Muhammadiyah Banda Aceh
Tahun 2016	: 6. S-2 Hukum Universitas Muhammadiyah Medan
Masa Jabatan	Jabatan
TMT 22/05/2019	: 1. Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB
TMT 07/03/2018	: 2. Hakim Mahkamah Syariah Sigli Kelas IB
TMT 28/08/2013	: 3. Ketua Mahkamah Syariah Kutacane Kelas II
TMT 16/09/2010	: 4. Wakil Ketua Mahkamah Syariah Calah Kelas II
TMT 10/04/1999	: 5. Hakim Makamah Syariah Meulaboh Kelas II
TMT 01/04/1998	: 6. Panitera Makamah Syariah Meulaboh Kelas II
TMT 01/06/1995	: 7. PNS/Calon Hakim Makamah Syariah Meulaboh Kelas II
TMT 01/03/1994	: 8. CPNS/Calon Hakim Mahkamah Syariah Meulaboh Kelas II

Profil Hakim

Drs. H. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H.

Ketua PA. Muara Enim
Hakim Madya Utama
Pembina Utama Muda (IV/c)



Drs. HUSAINI, M.H.

Wakil Ketua PA. Muara Enim
Hakim Madya Utama
Pembina Utama Muda (IV/c)



H. TAMIM, S.H.

Hakim PA. Muara Enim
Hakim Madya Utama
Pembina Utama Muda (IV/c)



Hj. SABARIAH, S.Ag., S.H.

Hakim PA. Muara Enim
Hakim Madya Muda
Pembina Tingkat I (IV/b)



ROLI WILPA, S.H.I., M.Sy.

Hakim PA. Muara Enim
Hakim Pratama Utama
Penata Tingkat I (III/d)



ZULFAHMI M. S., S.E.I., M.H.

Hakim PA. Muara Enim
Hakim Pratama Utama
Penata Tingkat I (III/d)



WERI SISWANTO BAD, S.H.I.

Hakim PA. Muara Enim
Hakim Pratama Madya
Penata (III/c)

Profil Pejabat Struktural



Daftar Isi

I	Ketua Sebelumnya	17	Bab III
II	Visi Misi		Sumber Daya Manusia
III	Profil Ketua	18	Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan / golongan / pendidikan
IV	Profil Wakil Ketua	21	Mutasi
V	Profil Hakim	21	Promosi
VI	Profil Pejabat Struktural	22	Pensiun
VII	Pengantar	22	Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)
VIII	Daftar Isi		
1	Bab I	24	Bab IV
	Pendahuluan		Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi
4	Bab II	24	A. Pengelolaan Keuangan
	A. Keadaan Perkara	31	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
4	Keadaan Perkara Tingkat Pertama	36	C. Pengelolaan Teknologi Informasi
6	Keadaan Perkara Tingkat Banding	36	Implementasi E-Court
7	Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	37	Implementasi SIPP
9	Keadaan Perkara tingkat Peninjauan Kembali		
11	B. Penyelesaian Perkara	42	Bab V
11	Jumlah sisa perkara yang diputus		Peningkatan Pelayanan Publik
11	Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	42	Akreditasi Penjaminan Mutu
12	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	45	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	48	Inovasi Pelayanan Publik
13	Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi		
14	C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISOPengadilan)	67	Bab VI
14	Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)		Pengawasan
14	Sidang keliling / pelayanan terpadu	68	A. Internal
16	Perkara prodeo (Pembebasan biaya perkara)	72	B. Evaluasi
		73	Bab VII
			Penutup
		73	A. Kesimpulan
		74	B. Rekomendasi

Pengantar

Dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, sebagaimana Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal tersebut, dengan ini Pengadilan Agama Muara Enim telah menyusun Laporan sebagaimana dimaksud.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Muara Enim merupakan media akuntabilitas kinerja yang ditarget dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja tersebut kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019 yang akan menyusul kemudian.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Agama Muara Enim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2019 dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang dilakukan secara lebih baik dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Muara Enim.

Muara Enim, 31 Desember 2019

Ketua,



Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
NIP. 196909301994031002

Bab I

Pendahuluan

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi, Pengadilan Agama Muara Enim sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman yang diterbitkan dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dengan berakhirnya tahun 2019 ini, maka Pengadilan Agama Muara Enim pun membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1730/SEK/OT.01.2/12/2019, tanggal 16 Desember 2019..

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini berisi mengenai kegiatan Pengadilan Agama Muara Enim pada tahun 2019, sebagai penyelenggara pelayanan publik Pengadilan Agama Muara Enim berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dan dalam mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Muara Enim mengambil kebijaksanaan untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama selaku penyelenggara pemerintahan negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yaitu, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam yaitu :

1. Perkawinan
2. Waris

3. Wasiat
4. Hibah
5. Waqaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Sadaqoh dan
9. Ekonomi Syariah

Pengadilan Agama Muara Enim dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan Pengadilan Agama Muara Enim membuat Renstra 2015-2019 yang selalu di reviu dengan visi “**Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung**” sedangkan misi Pengadilan Agama Muara Enim, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Mewujudkan badan peradilan yang mudah diakses oleh pencari keadilan.
4. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam mencapai sasaran strategis, 4 (empat) hal tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Muara Enim untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI.
2. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama.
3. Program peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Muara Enim.

Dari program dan kegiatan tersebut, Pengadilan Agama Muara Enim melayani masyarakat pencari keadilan yang berada pada yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang memiliki wilayah hukum 2 kabupaten yaitu Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Bab II

A. Keadaan Perkara

Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan alur perkara dan jenis perkara adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Alur Perkara Tahun 2019

Alur Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut	Sisa
Perdata Gugatan	25	1.128	1.153	1.076	77	0
Perdata Permohonan	1	683	684	676	8	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Jumlah	26	1.811	1.837	1.752	85	0

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019												Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut	Sisa
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des				
Izin Poligami	0	1	1	2	0	0	1	1	0	0	1	0	2	9	9	0	0
Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispensasi Kawin	0	14	8	11	9	6	9	9	4	10	10	24	13	127	127	3	0
Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kelalaian atas Kewajiban Sumai / Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerai Talak	10	30	15	28	24	14	28	33	26	28	23	25	12	286	277	19	0
Cerai Gugat	15	104	54	85	59	38	67	92	43	83	82	65	31	803	763	55	0
Harta Bersama	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	1	0	6	4	2	0
Penguasaan Anak	0	0	2	1	1	0	1	1	1	2	1	0	1	11	11	0	0
Hadhonah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hak-Hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perwalian	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isbat Nikah	0	17	10	323	11	8	5	11	25	8	111	16	4	549	549	4	0
Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wali Adhal	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0
Kewarisan	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	7	6	1	0
Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Shodaqoh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penetapan Ahli Waris/ Lain-Lain	1	2	0	1	0	0	1	0	1	0	2	2	0	9	8	1	0
Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	26	169	93	451	104	67	116	150	101	132	231	134	63	1.837	1.752	85	0

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2019 sebanyak 1.811 perkara, jumlah tersebut meningkat **30,76%** dibandingkan tahun 2018 yang menerima sebanyak 1.385 perkara. Jumlah perkara yang diputus sebanyak 1.837 perkara, jumlah tersebut meningkat **27,22%** dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 1.444 perkara. Jumlah sisa perkara sebanyak 0 perkara, jumlah tersebut berkurang **100%** dari tahun 2018 yang berjumlah 85 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara Pengadilan Agama Muara Enim sebesar **101%**.

Keadaan Perkara Tingkat Banding

Keadaan perkara tingkat banding pada Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan alur perkara dan jenis perkara adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019

Alur Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut	Sisa
Perdata Gugatan	0	6	6	5	0	1
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	6	6	5	0	1

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut	Sisa
Izin Poligami	0	0	0	0	0	0
Izin Kawin	0	0	0	0	0	0
Dispensasi Kawin	0	0	0	0	0	0
Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0
Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Kelalaian atas Kewajiban Sumai / Isteri	0	0	0	0	0	0
Cerai Talak	0	1	1	1	0	0
Cerai Gugat	0	1	1	1	0	0
Harta Bersama	0	3	3	3	0	0
Penguasaan Anak	0	0	0	0	0	0
Hadhonah	0	0	0	0	0	0
Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0
Hak-Hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0
Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0
Perwalian	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0
Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0
Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0
Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0
Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0

Isbat Nikah	0	0	0	0	0	0
Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0
Wali Adhal	0	0	0	0	0	0
Kewarisan	0	1	1	0	0	1
Wasiat	0	0	0	0	0	0
Hibah	0	0	0	0	0	0
Wakaf	0	0	0	0	0	0
Shodaqoh	0	0	0	0	0	0
Penetapan Ahli Waris/Lain-Lain	0	0	0	0	0	0
Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	6	6	5	0	1

Perkara Tingkat Banding yang diterima Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2019 sebanyak 6 perkara, jumlah tersebut sama dibandingkan tahun 2018 yang menerima sebanyak 6 perkara juga. Jumlah perkara yang diputus sebanyak 5 perkara, jumlah tersebut menurun **16,67%** dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 6 perkara. Jumlah sisa perkara sebanyak 1 perkara, jumlah tersebut meningkat **16,67%** dari tahun 2018 yang berjumlah 0 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara Tingkat Banding sebesar **83,33%**.

Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Keadaan perkara tingkat kasasi pada Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan alur perkara dan jenis perkara adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019

Alur Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut	Sisa
Perdata Gugatan	0	0	0	5	0	0
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Kasasi pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut	Sisa
Izin Poligami	0	0	0	0	0	0
Izin Kawin	0	0	0	0	0	0
Dispensasi Kawin	0	0	0	0	0	0
Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0
Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Kelalaian atas Kewajiban Sumai / Isteri	0	0	0	0	0	0
Cerai Talak	0	0	0	0	0	0
Cerai Gugat	0	0	0	0	0	0
Harta Bersama	0	0	0	0	0	0
Penguasaan Anak	0	0	0	0	0	0
Hadhonah	0	0	0	0	0	0
Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0
Hak-Hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0
Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0
Perwalian	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0
Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0
Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0
Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0
Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0
Isbat Nikah	0	0	0	0	0	0
Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0
Wali Adhal	0	0	0	0	0	0
Kewarisan	0	0	0	0	0	0
Wasiat	0	0	0	0	0	0
Hibah	0	0	0	0	0	0
Wakaf	0	0	0	0	0	0
Shodaqoh	0	0	0	0	0	0
Penetapan Ahli Waris / Lain-Lain	0	0	0	0	0	0
Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Perkara Tingkat Kasasi yang diterima Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2019 sebanyak 0 perkara, jumlah tersebut menurun **100%** dibandingkan tahun 2018 yang menerima sebanyak 1 perkara. Karena tidak menerima perkara tingkat kasasi, maka jumlah perkara yang diputus sebanyak 0 perkara, jumlah tersebut menurun **100%** dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 1 perkara. Jumlah sisa perkara sebanyak 0 perkara, jumlah tersebut sama dengan tahun 2018 yang berjumlah 0 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara Tingkat Kasasi sebesar **0%**.

Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Keadaan perkara tingkat peninjauan kembali pada Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan alur perkara dan jenis perkara adalah sebagai berikut

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019

Alur Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut	Sisa
Perdata Gugatan	0	0	0	5	0	0
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut	Sisa
Izin Poligami	0	0	0	0	0	0
Izin Kawin	0	0	0	0	0	0
Dispensasi Kawin	0	0	0	0	0	0
Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0
Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Kelalaian atas Kewajiban Sumai / Isteri	0	0	0	0	0	0
Cerai Talak	0	0	0	0	0	0
Cerai Gugat	0	0	0	0	0	0
Harta Bersama	0	0	0	0	0	0

Penguasaan Anak	0	0	0	0	0	0
Hadhonah	0	0	0	0	0	0
Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0
Hak-Hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0
Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0
Perwalian	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0
Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0
Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0
Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0
Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0
Isbat Nikah	0	0	0	0	0	0
Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0
Wali Adhal	0	0	0	0	0	0
Kewarisan	0	0	0	0	0	0
Wasiat	0	0	0	0	0	0
Hibah	0	0	0	0	0	0
Wakaf	0	0	0	0	0	0
Shodaqoh	0	0	0	0	0	0
Penetapan Ahli Waris / Lain-Lain	0	0	0	0	0	0
Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Perkara Tingkat Peninjauan Kembali yang diterima Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2019 sebanyak 0 perkara, jumlah tersebut sama dibandingkan tahun 2018 yang menerima sebanyak 0 perkara. Karena tidak menerima perkara tingkat peninjauan kembali, maka jumlah perkara yang diputus sebanyak 0 perkara, jumlah tersebut sama dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 0 perkara. Jumlah sisa perkara sebanyak 0 perkara, jumlah tersebut sama dengan tahun 2018 yang berjumlah 0 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara Tingkat Kasasi sebesar **0%**.

B. Penyelesaian Perkara

Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Keadaan sisa perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan alur perkara dan jenis perkara adalah sebagai berikut

Tabel Keadaan Sisa Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Alur Perkara Tahun 2019

Alur Perkara	Sisa Perkara 2018	Putus 2019	Sisa 2019
Perdata Gugatan	25	25	0
Perdata Permohonan	1	1	0
Gugatan Sederhana	0	0	0
Jumlah	26	26	0

Tabel Keadaan Sisa Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2019

Alur Perkara	Sisa Perkara 2018	Putus 2019	Sisa 2019
Cerai Gugat	15	15	0
Cerai Talak	10	10	0
Lain-Lain (Perbaikan Buku Nikah)	1	0	0
Jumlah	26	26	0

Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Keadaan perkara tingkat pertama yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut

Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019

Jenis Perkara	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan)			Jumlah
	1 sd 3	3 sd 5	> 5	
Perdata Gugatan	1.097	48	8	1.153
Perdata permohonan	684	0	0	684
Gugatan Sederhana	0	0	0	0
Jumlah	1.781	48	8	1.837

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Keadaan perkara tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Berdasarkan Alur Perkara Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019

Alur Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Mengajukan Banding	Tidak Mengajukan Banding
Perdata Gugatan	25	1.128	1.153	1.076	6	1.070
Perdata Permohonan	1	683	684	676	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Jumlah	26	1.811	1.837	1.752	6	1.070

Keadaan perkara tingkat banding yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Banding yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019

Alur Perkara	Perkara Banding	Putus Banding	Sisa Banding	Mengajukan Kasasi	Tidak Mengajukan Kasasi
Perdata Gugatan	6	5	1	0	0
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0
Jumlah	6	5	0	0	0

Keadaan perkara tingkat kasasi yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Kasasi yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019

Alur Perkara	Perkara Kasasi	Putus Kasasi	Sisa Kasasi	Mengajukan PK	Tidak Mengajukan PK
Perdata Gugatan	0	0	0	0	0
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0

Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

Penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Agama Muara Enim melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel Data Penyelesaian Perkara melalui Mediasi pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Gugatan 2019	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Medias		
			Berhasil	Tidak Berhasi	Tidak Dapat Dilaksanakan
Perdata Gugatan	1.153	147	6	141	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0
Jumlah	1.153	147	6	141	0

Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Penyelesaian perkara pidana anak pada Pengadilan Agama Muara Enim melalui diversi sebagaimana tabel berikut :

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak melalui Diversi pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019

Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan Diversi		
		Berhasil	Tidak Berhasi	Tidak Dapat Dilaksanakan
0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Posbakum (Satker yang Mendapat Alokasi dan Realisasi Anggaran)

Untuk Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum (posbakum), Pengadilan Agama Muara Enim mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dalam DIPA tahun anggaran 2019. Anggaran tersebut diberikan negara untuk jasa konsultasi layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Muara Enim dengan volume 240 jam layanan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019, anggaran sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah terealisasi secara keseluruhan (**sebesar 100%**), dimana anggaran tersebut dapat memberikan jasa konsultasi layanan bantuan hukum sebanyak 240 jam layanan selama satu tahun dengan jumlah sebanyak 527 perkara.

Dengan demikian, Realisasi Volume Keluaran (RVK) telah sesuai dengan Target Volume Keluaran (TVK) yang ditetapkan sebanyak 240 jam layanan, dimana capaian keluaran yang diperoleh pada tahun 2019 adalah sebesar **100%**, yang didapatkan dari rumus (240 jam layanan : 240 jam layanan x 100%).

Tabel Rekapitulasi Jasa Konsultasi layanan Bantuan Hukum Tahun 2019

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Progres (%)	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Progres (%)
Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama	24.000.000	24.000.000	100%	240	240	100%

Sidang Keliling

Untuk Sidang Keliling (sidang diluar gedung pengadilan), Pengadilan Agama Muara Enim mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta

rupiah) dalam DIPA tahun anggaran 2019. Anggaran tersebut diberikan negara untuk penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan dengan volume 50 perkara.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019, anggaran sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah terealisasi secara keseluruhan (**sebesar 100%**), dimana anggaran tersebut dapat menyelesaikan sebanyak 64 perkara sidang keliling, meskipun anggaran yang ditetapkan untuk menyelesaikan sebanyak 50 Perkara.

Dengan demikian, Realisasi Volume Keluaran (RVK) telah melampaui Target Volume Keluaran (TVK) yang ditetapkan sebanyak 50 Perkara, dimana capaian keluaran yang diperoleh pada tahun 2019 adalah sebesar **128%**, yang didapatkan dari rumus (64 perkara : 50 Perkara x 100%).

Tabel Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Sidang Keliling Tahun 2019

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Progres (%)	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Progres (%)
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Diluar Gedung	20.000.000	20.000.000	100%	50	64	128%

Pelayanan Sidang Terpadu

Untuk Sidang Terpadu (pelayanan sidang terpadu), Pengadilan Agama Muara Enim mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam DIPA tahun anggaran 2019. Anggaran tersebut diberikan negara untuk penyelesaian perkara sidang terpadu dengan volume 690 perkara.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019, anggaran sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah terealisasi secara keseluruhan (**sebesar 100%**), dimana anggaran tersebut dapat menyelesaikan sebanyak 410 perkara sidang terpadu, meskipun anggaran yang ditetapkan untuk menyelesaikan sebanyak 690 Perkara.

Dengan demikian, Realisasi Volume Keluaran (RVK) kurang mencapai Target Volume Keluaran (TVK) yang ditetapkan sebanyak 690 Perkara, dimana capaian keluaran yang diperoleh pada tahun 2019 adalah sebesar **59,42%**, yang didapatkan dari rumus (410 perkara : 690 Perkara x 100%).

Tabel Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Sidang Terpadu Tahun 2019

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Progres (%)	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Progres (%)
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	25.000.000	25.000.000	100%	690	410	59,42%

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Untuk Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara), Pengadilan Agama Muara Enim mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam DIPA tahun anggaran 2019. Anggaran tersebut diberikan negara untuk bantuan pembebasan biaya perkara dengan volume 10 perkara.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019, anggaran sebesar Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah terealisasi secara keseluruhan (**sebesar 100%**), dimana anggaran tersebut dapat menyelesaikan sebanyak 10 perkara prodeo.

Dengan demikian, Realisasi Volume Keluaran (RVK) telah sesuai dengan Target Volume Keluaran (TVK) yang ditetapkan sebanyak 10 Perkara, dimana capaian keluaran yang diperoleh pada tahun 2019 adalah sebesar **100%**, yang didapatkan dari rumus (10 perkara : 10 Perkara x 100%).

Tabel Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Prodeo Tahun 2019

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Progres (%)	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Progres (%)
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	4.750.00	4.750.00	100%	10	10	100%

Bab III

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia sebagai salah satu unsur pokok dalam kegiatan manajemen dan merupakan bagian yang dapat menggerakkan roda administrasi untuk pemberian dukungan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan. Sumber Daya manusia terdiri dari Teknis Yudisial dan Non Teknis berjumlah sebanyak 21 orang/personil dengan rincian sebagai berikut :

1. Sumberdaya Manusia Teknis Yudisial

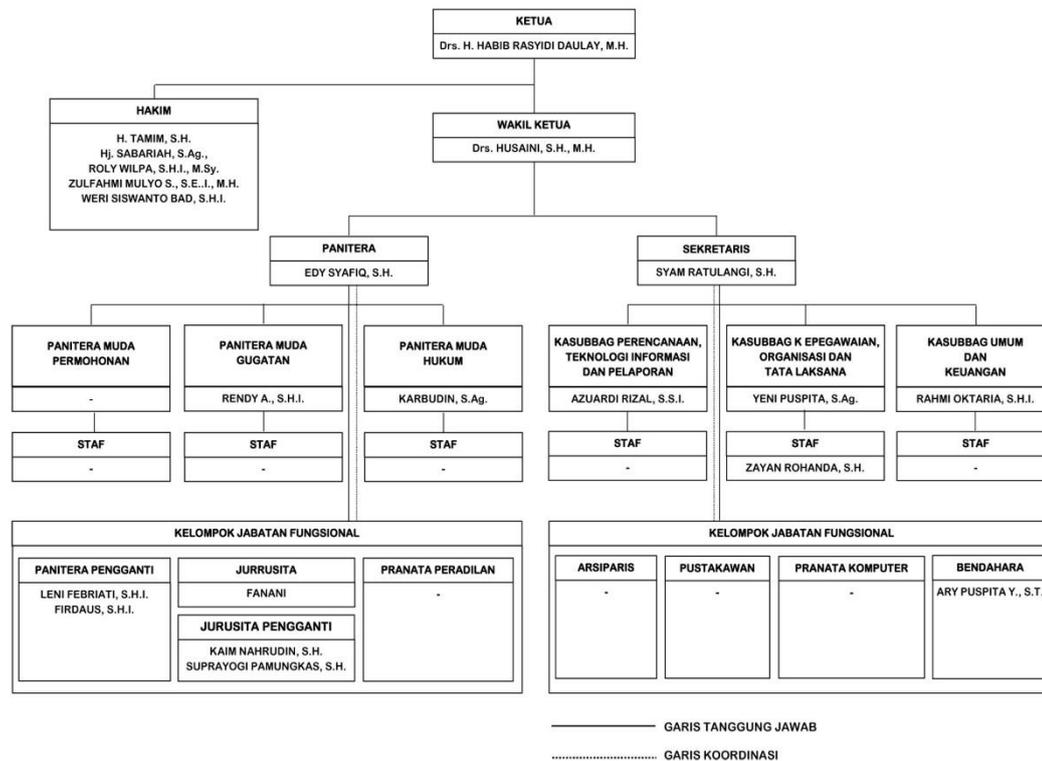
- Ketua : 1 orang
- Wakil Ketua : 1 orang
- Hakim : 5 orang
- Panitera : 1 orang
- Panitera Muda : 2 orang
- Panitera Pengganti : 2 orang
- Jurusita : 1 orang
- Jurusita Pengganti : 2 orang

2. Sumberdaya Manusia Non Teknis Yudisial.

- Sekretaris : 1 orang
- Kepala Sub Bagian : 3 orang
- Staf/Pelaksana/Fungsional : 2 orang

Adapun SDM Teknis Yudisial dan Non Teknis Pengadilan Agama Muara Enim sesuai dengan bagan struktur organisasi dapat dilihat sebagaimana dibawah ini :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/ Pendidikan

Sesuai struktur organisasi, sumber daya manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Agama Muara Enim terdiri dari 15 orang tenaga teknis dan 6 orang tenaga non teknis, yang seluruhnya berjumlah sebanyak 21 orang. Adapun komposisi SDM tersebut diuraikan sebagaimana berikut ini :

Tabel Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan/Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

Nama Pegawai	Jabatan Terakhir	TMT Jabatan	Pangkat	Golongan Ruang	Pendidikan
Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.	Ketua Hakim Madya Utama	20-10-2017	Pembina Utama Muda	IV/c	S-2 Program Studi Ilmu Hukum
Drs. Husaini, S.H., M.H.	Ketua Hakim Madya Utama	25-04-2019	Pembina Utama Muda	IV/c	S-2 Program Studi Ilmu Hukum
H. Tamim, S.H.	Hakim Madya Utama	09-06-2018	Pembina Utama Muda	IV/c	S-1 Program Studi Ilmu Hukum
Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.	Hakim Madya Muda	25-04-2019	Pembina Tingkat I	IV/b	S-1 Program Studi Ilmu Hukum

Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy.	Hakim Pratama Utama	17-12-2018	Penata Tingkat I	III/d	S-2 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I., M.H	Hakim Pratama Utama	25-04-2019	Penata Tingkat I	III/d	S-2 Program Studi Ilmu Hukum
Weri Siswanto BAD, S.H.I.	Hakim Pratama Madya	17-12-2018	Penata	III/c	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Edy Syafiq, S.H.	Panitera	29-12-2015	Pembina	IV/a	S-1 Program Studi Ilmu Hukum
Syam Ratulangi, S.H.	Sekretaris	01-12-2018	Pembina	IV/a	S-1 Program Studi Ilmu Hukum
Karbudin, S.Ag.	Panitera Muda Hukum	08-08-2011	Penata Tingkat I	III/d	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Rendy A, S.H.I.	Panitera Muda Gugatan	23-01-2017	Penata	III/c	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Yeni Puspita, S.Ag.	Kepala Sub Bagian kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	29-12-2015	Penata Tingkat I	III/d	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Rahmi Oktaria, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	29-12-2015	Penata	III/c	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Azuardi Rizal, S.S.I.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	29-03-2019	Penata Muda Tingkat I	III/b	S-1 Program Studi Ilmu Komputer
Leni Pebriati, S.H.I.	Panitera Pengganti	17-06-2019	Penata	III/c	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Firdaus, S.H.I.	Panitera Pengganti	29-02-2016	Penata	III/c	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Fanani	Jurusita	21-06-2015	Penata Muda Tingkat I	III/b	SMA
Kaim Nahrudi, S.H.	Jurusita Pengganti	20-11-2008	Penata Tingkat I	III/d	S-1 Program Studi Ilmu Hukum
Suprayogi Pamungkas	Jurusita Pengganti	01-12-2005	Pengatur Tingkat I	II/d	SMA
Zayan Rohanda, S.H.	Staf Pelaksana	07-08-2019	Penata	III/c	S-1 Program Studi Ilmu Hukum
Ary Puspita Yudha, S.Kom.	Staf Pelaksana	30-12-2015	Penata Muda Tingkat I	III/b	S-1 Program Studi Ilmu Komputer

Dari 21 orang SDM yang ada tersebut, sebanyak 1 orang merupakan golongan II/d (Pengatur Tingkat I), jumlah tersebut sebesar 4,8% dari jumlah SDM.

Sebanyak 3 orang merupakan golongan III/b (Penata Muda Tingkat I), jumlah tersebut sebesar 14,3% dari jumlah SDM. Sebanyak 6 orang merupakan golongan III/c (Penata), jumlah tersebut sebesar 28,5% dari jumlah SDM. Sebanyak 5 orang merupakan golongan III/d (Penata Tingkat I), jumlah tersebut sebesar 23,8% dari jumlah SDM. Sebanyak 2 orang merupakan golongan IV/a (Pembina), jumlah tersebut sebesar 9,5% dari jumlah SDM. Sebanyak 1 orang merupakan golongan IV/b (Pembina Tingkat I), jumlah tersebut sebesar 4,8% dari jumlah SDM. Sebanyak 3 orang merupakan golongan IV/c (Pembina Utama Muda), jumlah tersebut sebesar 14,3% dari jumlah SDM. Adapun komposisi SDM tersebut diuraikan sebagaimana berikut ini :

Tabel Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Golongan Ruang	Jumlah	Komposisi
IV/e	0	0%
IV/d	0	0%
IV/c	3	14,3%
IV/b	1	4,8%
IV/a	2	9,5%
III/d	5	23,8%
III/c	6	28,5%
III/b	3	14,3%
III/a	0	0%
II/d	1	4,8%
II/c	0	0%
II/a	0	0%
Jumlah	21	100%

Dari 21 orang SDM yang ada tersebut, sebanyak 2 orang memiliki jenjang pendidikan tingkat SMA, jumlah tersebut hanya 9,5% dari jumlah SDM yang ada saat ini. Sedangkan yang memiliki jenjang pendidikan tingkat S-1 jumlahnya sebanyak 15 orang, dimana jumlah tersebut mencapai 71,4% dari jumlah SDM. Kemudian untuk jenjang pendidikan tingkat S-2 adalah sisanya sebanyak 4 orang, jumlah tersebut hanya 19,1% dari jumlah SDM. Adapun komposisi SDM tersebut diuraikan sebagaimana berikut ini :

Tabel Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Komposisi
S-3	0	0 %
S-2	4	19,1%
S-1/D-IV	15	71,4%
D-III	0	0 %
D-II	0	0 %
D-I	0	0 %
SMA	2	9,5%
SMP	0	0 %
Jumlah	21	100%

Mutasi

Mutasi bagi Pegawai Negeri dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Selama tahun 2019 SDM Pengadilan Agama Muara Enim mendapat mutasi sebagai berikut :

Tabel Mutasi dan Promosi Hakim Tahun 2019

Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
Drs. Husaini, S.H., M.H.	Hakim Mahkamah Syariah Sigli Kelas IB	Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Rapim 16 April 2019
Hj. Sabariah, S.Ag, S.H	Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas IB	Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Rapim 16 April 2019
Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I., M.H	Hakim Pengadilan Agama Sekayu Kelas II	Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Rapim 16 April 2019
Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I.	Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas IB	Rapim 16 April 2019
Badrudin, S.H.I., M.H	Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas IB	Rapim 16 April 2019

Promosi

Tabel Promosi Pejabat Fungsional Tahun 2019

Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
Leni Perbriati, S.H.I.	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Rapim 24 Mei 2019
Heri Otarua, S.H	Staf Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Muara Dua Kelas II	Rapim 23 Mei 2019

Luthfi Hadisaputra, S.H.	Staf Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pagaralam Kelas II	Rapim 23 Mei 2019
--------------------------	---	--	----------------------

Tabel Promosi Pejabat Struktural Tahun 2019

Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
Azuardi Rizal, S.S.I.	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Sekayu Kelas II	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Muara Enim Kelas II	TPM 30 Januari 2019

Pindah Tugas

Tabel Pindah Tugas Pegawai Tahun 2019

Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
Zayan Rohanda, S.H.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan tata Laksana Pengadilan Agama Muara Teweh Kelas II	Pelaksana pada Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	TPM 26 Juli 2019

Pensiun

Tabel Pensiun Pegawai Tahun 2019

Nama	Pangkat / Golongan	Jabatan	TMT Pensiun	Status Pensiun
H. Riskullah, S.H.	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	22 September 2019	Meninggal
Armalena Bakti, S.H.	Penata Tingkat I III/d	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	1 Oktober 2019	BUP

Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang Telah Mengikuti Diklat)

Pembinaan SDM terhadap tenaga teknis yustisial yang terdiri hakim dan panitera serta jurusita dengan mengikuti pendalaman materi hukum formil dan materiil. Adapun data pelatihan dan pembinaan sebagai berikut :

Tabel Diklat Tenaga Teknis Tahun 2019

Nama	Jabatan	Nama Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.	Ketua	Pelatihan Sertifikasi Manajemen Media, Pelatihan Bahasa Inggris dan Pelatihan Mentoring Leader Tahun Anggaran 2019	Pusdiklat Menpim Balitbang Diklat Kundil MA RI	15 sd 29 September 2019

Tabel Diklat Tenaga Non Teknis Tahun 2019

Nama	Jabatan	Nama Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
Syam Ratulangi, S.H.	Sekretaris	Diklat PIM Tingkat III	Pusdiklat Menpim Balitbang Diklat Kundil MA RI	27 Jan sd 10 Mei 2019

Bab IV

Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi

A. Pengelolaan Keuangan

Alokasi anggaran Pengadilan Agama Muara Enim memiliki dua macam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yakni DIPA unit organisasi pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan Nomor SP DIPA-005.01.2.402282/2019, dan DIPA unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor SP DIPA-005.04.2.402283/2019. DIPA tersebut disahkan pada tanggal 5 Desember 2018.

Tabel DIPA 01 Tahun Anggaran 2019

Program	Kegiatan	Output	Anggaran	Volume Keluaran
00501.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1066 Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	970 Layanan Dukungan Manajemen Satker	4.045.000	1 Layanan
00501.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1066 Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	994 Layanan Perkantoran	4.264.343.000	1 Layanan
00501.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana Dilingkungan Mahkamah Agung	951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	38.500.000	1 Layanan
Jumlah			4.302.843.000	

Tabel DIPA 04 Tahun Anggaran 2019

Program	Kegiatan	Output	Anggaran	Volume Keluaran
00504.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1053 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	003 Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara	4.750.000	10 Perkara
00504.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1053 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	004 Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung	20.000.000	50 Perkara
00504.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1053 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	005 Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama	24.000.000	240 Jam Layanan
00504.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1053 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	009 Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	25.000.000	690 Perkara
Jumlah			73.750.000	

REVISI ANGGARAN

Tabel Revisi Ke-1 DIPA 01 Tahun Anggaran 2019 (29 Mei 2019)

Kode	Uraian	Sebelum	Sesudah	Kenaikan / Penurunan
1066.994	Layanan Perkantoran	3.833.164.000	3.911.097.000	77.933.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	752.225.000	8.30158.000	77.933.000
B	Langganan Daya dan Jasa	157.378.000	235.311.000	77.933.000
52111	Belanja Keperluan Perkantoran	3.000.000	80.933.000	77.933.000
	- Langganan Web Hosting	3.000.000	3.000.000	77.933.000
	- Tambahan Internet (BA BUN)	-	77.933.000	77.933.000

Kode	Uraian	Sebelum	Sesudah	Kenaikan / Penurunan
1071.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	26.000.000	26.000.000	-
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			
A	Alat Pengolah Data Pendukung SIPP			
53211	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	26.000.000	26.000.000	-
	- Laptop Untuk Hakim	26.000.000	26.000.000	-
	- Pengadaan Laptop Hakim (BA BUN)	-	12.500.000	12.500.00

Tabel Revisi Ke-2 DIPA 01 Tahun Anggaran 2019 (19 Agustus 2019)

Kode	Uraian	Sebelum	Sesudah	Kenaikan / Penurunan
1066.994	Layanan Perkantoran	3.911.097.000	395.3097.000	42.000.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	830.158.000	872.158.000	42.000.000
B	Langganan Daya dan Jasa	235.311.000	277.311.000	42.000.000
522141	Belanja Sewa	-	42.000.000	42.000.000
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim (BABUN)	-	42.000.000	42.000.000

Tabel Revisi Ke-3 DIPA 01 Tahun Anggaran 2019 (4 September 2019)

Kode	Uraian	Sebelum	Sesudah	Kenaikan / Penurunan
1066.994	Layanan Perkantoran	3.953.097.000	3.953.097.000	-
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	872.158.000	872.158.000	-
B	Langganan Daya dan Jasa	277.311.000	265.011.000	(12.300.000)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.000.000	3.700.000	(2.300.000)
522112	Belanja Langganan Telephon/Internet	21.200.000	18.200.000	(3.000.000)
522113	Belanja Langganan Air	25.198.000	18.198.000	(7.000.000)
C	Pemeliharaan Kantor	251.972.000	264.272.000	12.300.000
523121	Belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin	118.952.000	131.252.000	12.300.000

Tabel Revisi Ke-4 DIPA 01 Tahun Anggaran 2019 (15 November 2019)

Kode	Uraian	Sebelum	Sesudah	Kenaikan / Penurunan
1066.994	Layanan Perkantoran	3.953.097.000	4.264.343.000	311.246.000
001	Gaji dan Tunjangan	3.080.939.000	3.392.185.000	311.246.000
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.041.623.000	1.191.343.000	149.720.000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000	23.000	-
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	78.574.000	96.844.000	18.270.000
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	24.950.000	29.423.000	4.473.000
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	21.060.000	33.750.000	12.690.000
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.322.360.000	1.604.760.000	282.400.000
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	225.026.000	188.280.000	(36.746.000)
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	73.489.000	59.312.000	(14.177.000)
511129	Belanja Uang Makan PNS	229.680.000	181.420.000	(48.260.000)
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	64.154.000	7.030.000	57.124.000

Tabel Revisi Ke-5 DIPA 01 Tahun Anggaran 2019 (5 November 2019)

Kode	Uraian	Sebelum	Sesudah	Kenaikan / Penurunan
1066.994	Layanan Perkantoran	3.953.097.000	3.953.097.000	-
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	872.158.000	872.158.000	-
B	Langganan Daya dan Jasa	265.011.000	244.011.000	(21.000.000)
522111	Belanja Langganan Listrik	101.980.000	83.680.000	(18.300.000)
522112	Belanja Langganan Telephon/Internet	18.200.000	17.500.000	(700.000)
522113	Belanja Langganan Air	18.198.000	16.198.000	(2.000.000)
C	Pemeliharaan Kantor	264.272.000	285.272.000	21.000.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	133.020.000	146.600.000	13.580.000
523121	Belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin	131.252.000	138.672.000	7.420.000

Tabel Revisi Ke-6 DIPA 01 Tahun Anggaran 2019 (10 Desember 2019)

Kode	Uraian	Sebelum	Sesudah	Kenaikan / Penurunan
1066.994	Layanan Perkantoran	4.264.343.000	4.264.343.000	-
001	Gaji dan Tunjangan	3.392.185.000	3.392.185.000	-
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.191.343.000	1.188.343.000	(3.000.000,00)
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000	23.000	-
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	96.844.000	97.499.000	655.000,00
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	29.423.000	29.553.000	130.000,00
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	33.750.000	33.750.000	-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.604.760.000	1.603.960.000	(800.000,00)
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	188.280.000	190.854.000	2.574.000,00
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	59.312.000	59.602.000	290.000,00
511129	Belanja Uang Makan PNS	181.420.000	181.201.000	(219.000,00)
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	7.030.000	7.400.000	370.000,00

REALISASI ANGGARAN

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 01

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	4.045.000	4.040.000	99,88%	5.000	0,12%
Belanja Keperluan Perkantoran	287.173.000	268.342.817	93,44%	18.830.183	6,56%
Belanja Pengiriman Surat Dinas	3.700.000	3.349.506	90,53%	350.494	9,47%
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	45.720.000	45.720.000	100,00%	-	0,00%
Belanja Barang Operasional Lainnya	19.120.000	19.120.000	100,00%	-	0,00%

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	54.020.000	54.019.000	100,00%	1.000	0,00%
Belanja Langganan Listrik	83.680.000	80.956.367	96,75%	2.723.633	3,25%
Belanja Langganan Telepon/Internet	17.500.000	17.445.562	99,69%	54.438	0,31%
Belanja Langganan Air	16.198.000	15.647.750	96,60%	550.250	3,40%
Belanja Sewa Rumah Dinas Hakin	42.000.000	42.000.000	100,00%	-	0,00%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	146.600.000	145.808.946	99,46%	791.054	0,54%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	138.672.000	138.671.523	100,00%	477	0,00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.775.000	17.769.800	99,97%	5.200	0,03%
Jumlah	872.158.000	852.891.271	97,79%	23.311.729	2,67%

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Pegawai DIPA 01

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
Belanja Gaji Pokok PNS	1.188.343.000	1.188.293.300	100,00%	49.700	0,00%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000	15.123	65,75%	7.877	34,25%
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	97.499.000	97.498.014	100,00%	986	0,00%
Belanja Tunjangan Anak PNS	29.553.000	29.552.987	100,00%	13	0,00%
Belanja Tunjangan Struktural PNS	33.750.000	33.750.000	100,00%	-	0,00%
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.603.960.000	1.603.960.000	100,00%	-	0,00%
Belanja Tunjangan PPh PNS	190.854.000	190.853.861	100,00%	139	0,00%
Belanja Tunjangan Beras PNS	59.602.000	59.601.660	100,00%	340	0,00%
Belanja Uang Makan PNS	181.201.000	179.964.000	99,32%	1.237.000	0,68%
Belanja Tunjangan Umum PNS	7.400.000	7.400.000	100,00%	-	0,00%
Jumlah	3.392.185.000	3.390.888.945	99,96%	1.296.055	0,04%

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Modal DIPA 01

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.500.000	37.200.000	96,62%	1.300.000	3,38%
Jumlah	38.500.000	37.200.000	96,62%	1.300.000	3,38%

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 04

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Prodeo)	4.750.000	4.750.000	100%	-	0%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Sidang Keliling)	20.000.000	20.000.000	100%	-	0%

Belanja Jasa Konsultan (Posbakum)	24.000.000	24.000.000	100%	-	0%
Beban Perjalan Dinas Dalam Kota (Sidang Terpadu)	25.000.000	25.000.000	100%	-	0%
Jumlah	73.750.000	73.750.000	100%	-	0%

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Tabel PNBP 402282 (01)

Kode	Uraian Jenis Pendapatan	Realisasi pendapatan
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.924.927
Jumlah		1.924.927

Tabel PNBP 402283 (04)

Kode	Uraian Jenis Pendapatan	Realisasi pendapatan
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	54.640.000
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	79.501.900
Jumlah		134.141.900

PENGELOLAAN BIAYA PERKARA

Tabel Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
Saldo Awal	96.370.000	-
Penerimaan	66.038.000	-
Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*)		3.150.000
Biaya Panggilan		27.060.000
Biaya Penerjemah		0
Biaya Pemberitahuan		10.735.000
Biaya Sita		0
Biaya Pemeriksaan Setempat		0
Biaya Sumpah		0
Biaya Saksi Ahli		0
Biaya Pengiriman		0
Biaya Materai		648.000
PNBP Biaya Pendaftaran		1.940.000
PNBP Redaksi		1.080.000
PNBP Lain-lain		2.040.000

Pengembalian Sisa Panjar		46.635.000
Biaya Lain-lain		0
Jumlah	162.408.000	93.288.000
Saldo Akhir	69.120.000	-
Saldo di Bank	66.205.081	-
Saldo di Brankas	2.914.919	-

Tabel Biaya Proses/ATK/Pemberkasan

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
Saldo Awal	11.940.500	-
Penerimaan	3.150.000	-
Pengeluaran		5.422.000
Saldo Akhir	9.668.500	-

Tabel Biaya Sita Jaminan/Eksekusi/Lelang

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
Saldo Awal	0	-
Penerimaan	0	-
Biaya Materai		0
Biaya Leges		0
Biaya Sita Eksekusi		0
Biaya Juru Sita		0
Biaya Pengumuman Lelang/Iklan		0
Biaya Juru Lelang		0
Biaya Lelang		0
Biaya Saksi		0
Biaya Pemberitahuan		0
Biaya Keamanan		0
Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi		0
PNBP		0
Lain-lain		0
Jumlah	0	0
Saldo Akhir	0	-

Tabel Biaya Sita Jaminan/Eksekusi/Lelang

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
Saldo Awal	0	
Penerimaan (Uang Konsinyasi dan Panjar Konsinyasi)	0	
Biaya Pelaksanaan Penawaran		0
Biaya pendaftaran		0
Biaya Proses/ATK		0
Redaksi		0
Materai		0
Leges		0
Pengambilan Uang Konsinyasi		0
Biaya Lain-lain		0
Jumlah	0	0
Saldo Akhir	0	-

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Gedung

Dalam pembangunan gedung Kantor Pengadilan tidak boleh mengesampingkan ciri khas dari pada gedung kantor yang ada pada bagian depan mempunyai 4 (empat) pilar/ tiang kokoh berdiri tegak menunjukkan kewibawaan, Pengadilan Tingkat Pertama/ Pengadilan Tingkat Banding tempat para Hakim menegakkan hukum dan keadilan merupakan tempat yang terhormat yang harus di jaga kewibawaannya. Oleh karena itu peradilan harus dijaga kehormatan dan kewibawaannya, untuk mencapai derajat ini maka aparat peradilan, Hakim khususnya harus memiliki integritas moral yang tinggi dan tiada cacat celanya dan harus memiliki pula kemampuan profesional yang dapat diandalkan serta kematangan ilmu intelektual dapat diteladani oleh masyarakat luas.

Disamping itu 4 (Empat) pilar juga mengandung Azas proses peradilan yaitu: cepat, sederhana, biaya ringan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Yang dicita-citakan oleh Undang-undang. Pengadilan Agama Muara Enim yang berkedudukan di Jln. Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H., No. 1, Desa Kepur, Muara Enim dengan luas bangunan 1.400 M² yang terdiri dari 2 (dua) lantai.

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 04

Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
Ruang Ketua	1	Lantai II
Ruang Wakil Ketua	1	Lantai II
Ruang Hakim	1	Lantai II
Ruang Panitera	1	Lantai II
Ruang Sekretaris	1	Lantai II
Ruang Sidang Utama	1	Lantai I
Ruang Sidang Umum	2	Lantai I
Ruang Kepaniteraan	1	Lantai I
Ruang Kesekretariatan	1	Lantai I
Ruang Panmud Hukum	1	Lantai I
Ruang PP dan JS	1	Lantai I
Ruang Mediasi	1	Lantai I
Ruang Pelayanan Terpadu	1	Lantai I
Ruang Tunggu Sidang	1	Lantai I
Ruang Bermain Anak	1	Lantai I
Ruang Laktasi	1	Lantai I
Ruang Medis	1	Lantai I
Ruang Perpustakaan	1	Lantai II
Mushola	1	Lantai I
Gudang	2	Lantai I dan Lantai II
Ruang Arsip	1	Lantai II
Ruang Posbakum	1	Lantai I
Ruang Teleconference	1	Lantai I
Toilet Wanita	3	Lantai I
Toilet Pria	2	Lantai I
Pos Satpam	2	Lantai I
Ruang Server/IT	1	Lantai I
Ruang Rapat	1	Lantai II

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Muara Enim mendapatkan anggaran diperuntukkan pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, dan halaman kantor sebesar **Rp 146.600.000,-** (*seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*), dengan realisasi sebesar 99,5 %.

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
Pemeliharaan Gedung	146.600.000	145.808.946	99,5%	791.054	0,5%

Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Pengadilan Agama Muara Enim memiliki sarana dan prasarana fasilitas gedung berupa diantaranya sebagai berikut :

Tabel Sarana/Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana / Prasarana Fasilitas Gedung	Jumlah	Keterangan
Komputer/ Personal Computer	37	27 Kondisi Baik, 10 Kondisi Rusak Berat
Laptop	23	21 Kondisi Baik, 2 Kondisi Rusak Berat
Printer (Peralatan Personal Komputer)	23	17 Kondisi Baik, 6 Kondisi Rusak Berat
Ac	30	28 Kondisi Baik, 2 Kondisi Rusak Berat
PABX	1	Kondisi Baik
Scanner	1	Kondisi Baik
Faximile	1	Kondisi Baik
Mesin Finger	2	1 Kondisi Baik, 1 Kondisi Rusak Ringan
CCTV	10	Kondisi Baik
Numerator	1	Kondisi Baik
Brandkas	2	1 Kondisi Baik, 1 rusak berat
Filling Cabinet Besi	2	Kondisi Baik
Sice	7	Kondisi Baik
Papan Visual/ Papan Nama	6	Kondisi Baik
Lemari Besi/ Metal	8	Kondisi Baik
Meja Kerja Kayu	100	88 Kondisi Baik, 12 Kondisi Rusak Berat
Kursi Besi/ Metal	197	171 Kondisi Baik, 26 Kondisi Rusak Berat
Kersi Panjang Besi/ Metal	17	Kondisi Baik
Kursi Kayu	58	Kondisi Baik
UPS	6	Kondisi Baik
Lemari Kayu	7	Kondisi Baik
Server	2	Kondisi Baik
Rak Server	1	Kondisi Baik

Pengadaan

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2019 ada belanja modal sebesar **Rp 38.500.000,-** (*Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*), untuk pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) berupa Laptop sebanyak 3 buah.

Selain itu juga pada akhir tahun Pengadilan Agama Muara Enim mendapatkan hibah perangkat pengolah data pendukung PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) berupa 4 unit All In One PC (Personal Desktop), 4 buah UPS (*Uninterruptible Power Supply*), 1 unit Server, 1 unit Rak Server, dan 1 unit Kios *Touch Screen*.

Pemeliharaan

Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kantor selama satu tahun anggaran 2019 berupa pemeliharaan peralatan dan mesin meliputi perawatan kendaraan roda 4 dan roda 2, PC, Laptop, Printer, AC, dan inventaris lainnya senilai **Rp 138.672.000,-** (*seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	138.672.000	138.671.523	100%	477	0%

Penghapusan

Tidak ada penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada tahun 2019.

Kendaraan Dinas

Hingga akhir tahun 2019 jumlah kendaraan dinas yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Muara Enim yaitu :

Tabel Daftar Kendaraan Dinas

Nama Kendaraan Dinas	Tahun	Kondisi	Keterangan
Toyota Innova Type E Bensin	2007	Baik	MA <i>Dropping</i> Mobil Operasional Sekretaris

Toyota Innova Type G Bensin	2011	Baik	Pinjam Pakai dari Pemkab Muara Enim Mobil Operasional Panitera
Mitsubishi Pajero Solar	2011	Baik	Pinjam Pakai dari Pemkab Muara Enim Mobil Operasional Ketua
Toyota Kijang Standar KF80	2003	Baik	Pinjam Pakai dari Pemkab Muara Enim Mobil Operasional Kantor
Honda Mega Pro	2006	Baik	Motor Operasional Dinas Jabatan
Honda Mega Pro	2006	Baik	Motor Operasional Dinas Jabatan
Supra X125	2008	Baik	Motor Operasional Dinas Jabatan
Supra X125	2006	Baik	Motor Operasional Dinas Jabatan

Rumah Dinas

Hingga akhir tahun 2019 jumlah rumah dinas yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Muara Enim yaitu :

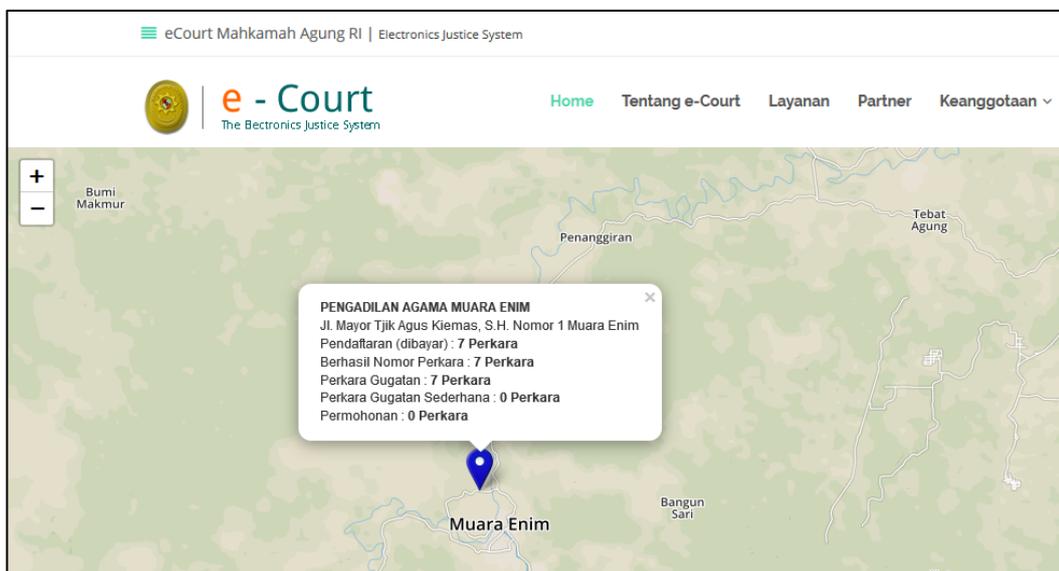
Tabel Daftar Rumah Dinas

Nama Rumah Dinas	Tahun	Kondisi	Keterangan
Rumah Dinas Ketua	2014	Baik	Pinjam Pakai dari Pemkab Muara Enim
Rumah Negara Gol. II Type B Permanen	2009	Baik	Milik Pengadilan Agama Muara Enim

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Muara Enim

Gambar Peta Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Muara Enim



Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 5610/DJA/HM.02.3/XI/2019 tanggal 26 November 2019, tentang Implementasi e-litigation di lingkungan peradilan agama, sebagai penerapan asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan Agama Muara Enim mengupayakan langkah-langkah yang kongkrit sampai tanggal 24 Desember 2019 dan sudah menerima/memproses dan memutus perkara e-litigation sebanyak 1 (satu) perkara, serta telah melaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk direkap dan di laporkan ke Dirjen Badilag berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama muara Enim Nomor W6-A5/1528/HK.05/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019, dengan lampiran sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Daftar Perkara E-Court

Uraian	Diterima	Dicabut	Putus Secara Elektronik	Putus Secara Biasa	Jumlah Putus	Sisa / Masih Dalam proses
Pendaftaran E-Court	7 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	6 Perkara	7 Perkara	0 Perkara

Implementasi SIPP di Pengadilan Agama Muara Enim

Poto Bersama Saat Menerima Piagam penghargaan SIPP



Dari rapor penanganan perkara berdasarkan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) periode 20 Desember 2019, Pengadilan Agama muara Enim berada dalam kategori III, yaitu kategori 1001-2500 perkara.

Berdasarkan penilaian pada akhir tahun 2019 yang dirilis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama di situs resminya pada tanggal 20 Desember 2019, Pengadilan Agama Muara Enim bertahan tetap di posisi pertama dengan nilai kinerja sebesar **97,29%**.

Gambar Raport Peringkat Kinerja SIPP Kategori III (1001-2500 Perkara)

A, RAPOR PENANGANAN PERKARA BERDASARKAN SIPP PERIODE 20 DESEMBER 2019																
KATEGORI III (1001-2500 PERKARA)																
No	Satuan Kerja	Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Putus	Beban Minutasi	Minutasi	Sisa Upload Putusan Tahun Ini	Upload Putusan Tahun Ini	Persentase Bobot Proses	Persentase Waktu Putus	Persentase Waktu Minutasi	Bobot Upload	Nilai Akhir
1	PA MUARA ENIM	1	1	5	8	1836	1823	1823	1823	1019	1823	74,99%	91,87%	100,00%	100,00%	97,29%
2	PA SEKAYU	1	1	2	9	1496	1472	1472	1472	211	1470	76,77%	91,48%	99,95%	99,86%	97,10%
3	PA PASIR PANGARAIAAN	1	1	2	9	1039	972	972	972	65	972	66,00%	89,75%	100,00%	100,00%	96,58%
4	PA TEMBILAHAN	1	1	2	8	1019	980	980	980	125	978	62,24%	90,53%	99,27%	99,80%	96,53%
5	PA SIMALUNGUN	1	1	2	5	1293	1247	1247	1247	520	1247	57,22%	87,78%	98,94%	100,00%	95,57%
6	PA KAYU AGUNG	1	1	4	13	2419	2334	2334	2334	1013	2334	75,86%	86,26%	98,87%	100,00%	95,38%
7	PA KUJALA TUNGKAL	1	1	2	9	1083	1016	1016	1016	0	1016	79,92%	87,93%	97,91%	100,00%	95,28%
8	PA PARIAMAN	1	1	5	10	1169	1128	1128	1128	0	1128	65,12%	86,83%	98,90%	100,00%	95,24%
9	PA BATAM	1	1	15	11	2459	2320	2324	2324	287	2320	61,72%	86,73%	98,54%	100,00%	95,06%
10	PA SITUBONDO	1	0	4	15	2358	2221	2221	2221	4	2220	66,07%	84,92%	100,00%	99,95%	94,96%

Selama tahun 2019, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengeluarkan dua kali penghargaan atas hasil kinerja SIPP. Penghargaan tersebut diberikan

sebagai apresiasi terhadap Pengadilan Agama yang berhasil mempertahankan posisi 10 besar secara berturut-turut tiap minggu pada masing-masing kategori.

Penghargaan pertama diterima Pengadilan Agama Muara Enim sesuai Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3277/DjA.3/HM.01/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019.

Gambar Daftar Satker Penerima Penghargaan yang Pertama

Lampiran I
Surat Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama MA RI
Nomor : 3277/DJA.3/HM.01/VII/2019
Tanggal: 4 Juli 2019

Daftar Satker Penerima Penghargaan
Rapor Penangan Perkara SIPP Periode 31 Mei – 28 Juni 2019

No	Satuan Kerja	PTA	Kategori
1	2	3	4
1	PA SURABAYA	PTA SURABAYA	I
2	PA KABUPATEN MALANG	PTA SURABAYA	I
3	PA INDRAMAYU	PTA BANDUNG	I
4	PA JEMBER	PTA SURABAYA	II
5	PA TANGERANG	PTA BANTEN	II
6	PA DEPOK	PTA BANDUNG	II
7	PA GARUT	PTA BANDUNG	II
8	PA CIBINONG	PTA BANDUNG	II
9	PA BEKASI	PTA BANDUNG	II
10	PA KAYU AGUNG	PTA PALEMBANG	III
11	PA BOGOR	PTA BANDUNG	III
12	PA BONDOWOSO	PTA SURABAYA	III
13	PA TRENGGALEK	PTA SURABAYA	III
14	PA SENGKANG	PTA MAKASSAR	III
15	PA GIRI MENANG	PTA MATARAM	III
16	PA TUBAN	PTA SURABAYA	III
17	PA PALEMBANG	PTA PALEMBANG	III
18	PA BANJARMASIN	PTA BANJARMASIN	III
19	PA MUARA ENIM	PTA PALEMBANG	III
20	PA SIBUHUAN	PTA MEDAN	IV

Gambar Piagam Penghargaan SIPP yang Pertama



Penghargaan kedua diterima Pengadilan Agama Muara Enim sesuai Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 422/DjA/HM.00/IX/2019 tanggal 3 September 2019.

Gambar Daftar Satker Penerima Penghargaan yang Kedua

Lampiran
Surat Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 422/DjA/HM.00/IX/2019
Tanggal : 3 September 2019

Daftar Satker Penerima Penghargaan
Rapor Penanganan Perkara SIPP Periode Agustus 2019

No	Satuan Kerja	PTA	Kategori
1	2	3	4
1.	PA Surabaya	PTA Surabaya	I
2.	PA Jember	PTA Surabaya	I
3.	PA Indramayu	PTA Bandung	I
4.	PA Kab. Malang	PTA Surabaya	I
5.	PA Sumber	PTA Bandung	I
6.	PA Cibinong	PTA Bandung	I
7.	PA Tigaraksa	PTA Banten	I
8.	PA Jakarta Timur	PTA Jakarta	I
9.	PA Banyuwangi	PTA Surabaya	I
10.	PA Tuban	PTA Surabaya	II
11.	PA Tasikmalaya	PTA Bandung	II
12.	PA Cikarang	PTA Bandung	II
13.	PA Kota Madya Malang	PTA Surabaya	II
14.	PA Depok	PTA Bandung	II
15.	PA Muara Enim	PTA Palembang	III
16.	PA Donggala	PTA Palu	III

Gambar Piagam Penghargaan SIPP yang Kedua



Diakhir tahun Pengadilan Agama Muara Enim berhasil memutus sebanyak 1.837 perkara. Jumlah tersebut mencapai **100%** dari jumlah beban perkara yang ditangani tahun 2019, yakni 1.811 perkara diterima tahun 2019 dan 26 perkara sisa tahun 2018. Hasil tersebut menjadikan Pengadilan Agama Muara Enim sebagai salah satu Pengadilan di Indonesia yang tidak memiliki sisa perkara (*Zero*), di tahun 2020 nanti.

Gambar Screen Shoot SIPP Lokal



Gambar Screen Shoot Halaman Dashboard SIPP MA



Hasil Screen Shoot Halaman Dashboard SIPP MA Pada Sinkronisasi Terakhir

Gambar Screen Shoot Halaman Rekapitulasi Data SIPP MA

REKAPITULASI DATA

Badan Peradilan: Badan Peradilan Agama
 Tingkat Banding: PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
 Pengadilan Tingkat Pertama: PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Pencarian:

No	Pengadilan	Sisa Lalu	Masuk	Minutasi	Sisa	Penangan Perkara	Verdi Terpasang	Sinkronisasi
1	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	26	1811	1837	0	100%	3.3.0-1	28/12/2019 12:46
Total		26	1811	1837	0	100%		

Hasil Screen Shoot Halaman Rekapitulasi Data SIPP MA Pada Sinkronisasi Terakhir

Bab V

Peningkatan Pelayanan Publik

Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam komitmen melaksanakan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM), pada tahun 2018 Pengadilan Agama Muara Enim telah berhasil meraih predikat **A (Excellence)** yang serahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 14 Juli 2018 di Balikpapan.

Selanjutnya Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama ini dilakukan penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan 22 Juni 2021, dengan rencana audit pada Juni 2019, Juni 2020, dan Juni 2021.

Gambar Screen Shoot Halaman Rekapitulasi Data SIPP MA

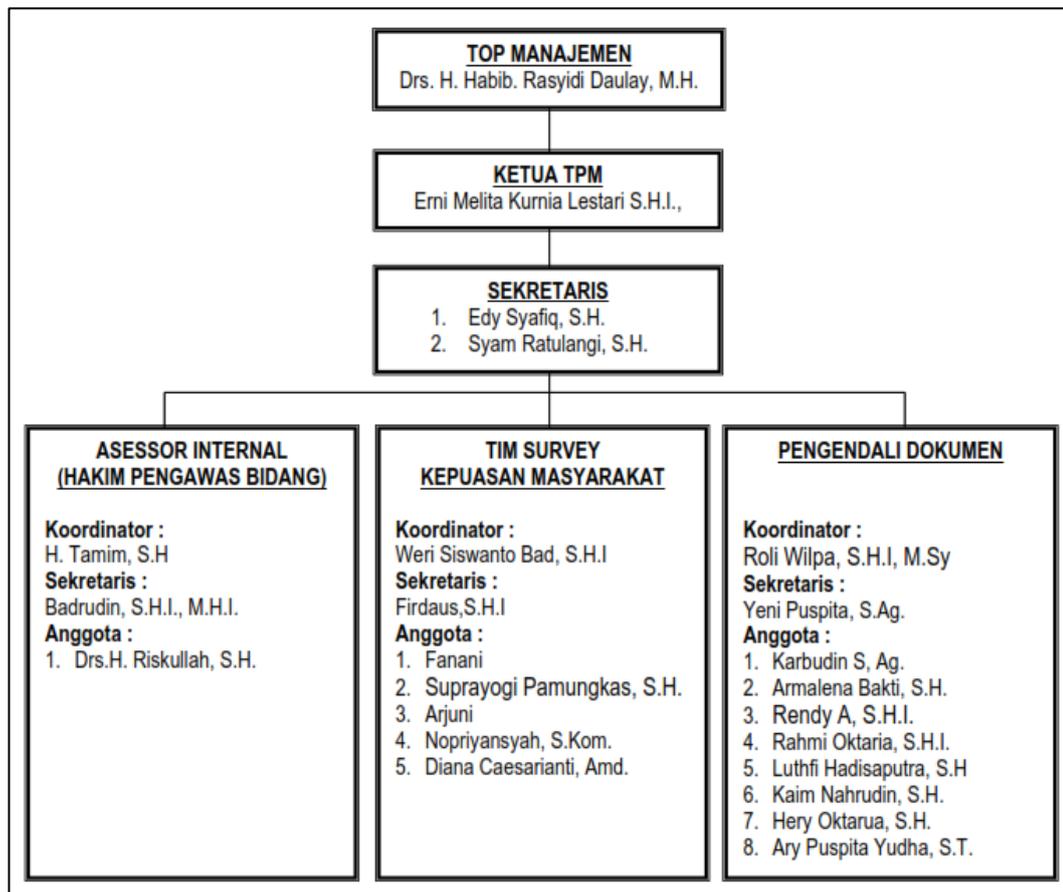


Untuk menghadapi *assessment surveillance pertama* Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H. perlu melakukan perubahan dan pergantian Tim dari Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) menjadi Tim Penjaminan Mutu (TPM), sehingga oleh karenanya perlu diterbitkan kembali surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim tentang Tim Penjaminan Mutu (TPM) terbaru dengan W6-A5/139/OT.01.3/I/2019 tanggal 10 Januari 2019.

Tabel Susunan Tim Penjamin Mutu Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DALAM INSTANSI	DALAM TIM AKREDITASI
1.	Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.	KETUA	TOP MANAJEMAN
2.	Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.	HAKIM	KETUA TIM PENJAMINAN MUTU
3.	Edy Syafiq, S.H.	PANITERA	SEKRETARIS
4.	Syam Ratulangi, S.H.	SEKRETARIS	
5.	H. Tamim, S.H.	HAKIM	ASESSOR INTERNAL
6.	Drs.H. Riskullah, S.H.	HAKIM	
7.	Badrudin, S.H.I., M.H.I.	HAKIM	
8.	Weri Siswanto Bad, S.H.I.	HAKIM	TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
9.	Firdaus, S.H.I.	PANITERA PENGGANTI	
10.	Fanani	JURUSITA	
11.	Suprayogi Pamungkas, S.H.	JURUSITA PENGGANTI	
12.	Arjuni	HONORER	
13.	Nopriyansyah, S.Kom	HONORER	
14.	Diana Caesarianti	HONORER	PENGENDALI DOKUMEN
15.	Roli Wlpa, S.H.I, M.Sy	HAKIM	
16.	Yeni Puspita, S.Ag.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	
17.	Karbudin S, Ag.	PANMUD HUKUM	
18.	Armalena Bakti, S.H.	PANMUD PERMOHONAN	
19.	Rendy A, S.H.I.	PANMUD GUGATAN	
20.	Rahmi Oktaria, S.H.I.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
21.	Luthfi Hadisaputra, S.H.	PLT KASUBBAG PERENCANAN TI DAN PELAPORAN	
22.	Kaim Nahrudin, S.H.	JURUSITA PENGGANTI	
23.	Hery Oktarua, S.H.	STAF KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
24.	Ary Puspita Yudha, S.T.	STAF KASUBBAG PERENCANAN TI DAN PELAPORAN	

Bagan Struktur Tim Penjamin Mutu Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019



Pada Senin (17/6/2019) *assessment surveillance pertama* Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Muara Enim pun dilaksanakan. *Lead Assessor*, Drs. H. Abdullah, S.H., M.H., datang dengan didampingi oleh tiga orang asesor pendamping, diantaranya Hj. Fara Umitha, S.H., Miftah Nurul Anwar, S.H., M.H., dan Arpita Pitriyanti, S.H., yang mana selaku *Assessor Eksternal* akan melakukan *Assessment Surveillance* Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Agama Muara Enim.

Sehubungan telah selesainya pelaksanaan *asesmen surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2019, yang dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama terhadap satuan kerja di lingkungan Peradilan Agama, yang mana Pengadilan Agama Muara Enim berhasil mempertahankan predikat **A (Excellent)**, sesuai

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 5367/DJA/OT.01.3/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

Gambar Lampiran Surat Dirjen Badilag Atas Assessment Surveillance APM

Lampiran Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI
Nomor : 5367 /DJA/OT.01.3/X/2019
Tanggal : 30 Oktober 2019

**HASIL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN AGAMA
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019**

NO	SATUAN KERJA	KELAS	PREDIKAT	PEROLEHAN
7	PTA Palembang			
1.	PTA Palembang	-	A (Excellent)	Surveillance I 2019
2.	PA Sekayu	II	A (Excellent)	SAPM II 2018
3.	PA Lubuk Linggau	IB	A (Excellent)	SAPM II 2018
4.	PA Kayu Agung	IB	A (Excellent)	Surveillance I 2018
5.	PA Palembang	IA	A (Excellent)	Surveillance I 2018
6.	PA Muara Enim	IB	A (Excellent)	Surveillance I 2019
7.	PA Baturaja	IB	A (Excellent)	Surveillance I 2019
8.	PA Lahat	IB	A (Excellent)	Surveillance I 2019

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penempatan dan Desain PTSP

Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Muara Enim terletak di bagian belakang gedung kantor, ruang ini merupakan pusat pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan layanan peradilan. Untuk menuju ke ruang tersebut, saat pertama kali tiba di Pengadilan Agama Muara Enim masyarakat dapat membaca dan mengikuti petunjuk arah yang disediakan. Desain PTSP yang ada meliputi loket meja informasi, loket meja pengaduan, loket meja pendaftaran, loket meja kasir, dan loket meja produk pengadilan, dilengkapi dengan papan identitas meja loket serta masing-masing petugasnya. Didalam ruang PTSP tersebut sudah terdapat tulisan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan

Agama Muara Enim dan tulisan Meja Informasi dan Pengaduan Pengadilan Agama Muara Enim pada belakang meja PTSP.

Fasilitas PTSP

Fasilitas Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Muara antara lain :

Tabel Daftar Fasilitas PTSP

Nama Fasilitas PTSP	Jumlah	Kondisi	Keterangan
Meja Panjang	1	Baik	Sesuai jumlah petugas PTSP
Kersi Petugas	5	Baik	Sesuai jumlah petugas PTSP
Kursi Hadap	5	Baik	Sesuai jumlah pengguna layanan PTSP
Kursi Tunggu	3	Baik	Untuk pengguna layanan PTSP menunggu antrian
Komputer	5	Baik	Sesuai jumlah petugas PTSP
Printer	5	Baik	Sesuai jumlah petugas PTSP
Kios Touch Screen Antrian Pengunjung	1	Baik	Untuk pengunjung mengambil nomor antrian layanan PTSP
Printer Antrian Pengunjung	1	Baik	Untuk pengunjung mencetak nomor antrian layanan PTSP
TV Layar Panggil Antrian	1	Baik	Untuk pengunjung melihat nomor antrian layanan PTSP yang sedang di panggil
Telepon	2	Baik	Telepon saluran internal dan eksternal (PABX) yang difungsikan
Alat Tulis	5	Baik	Alat tulis yang tersedia sesuai jumlah petugas PTSP dan dipergunakan
Buku Register/Jurnal	3	Baik	Tersedia Register dan Jurnal yang digunakan
Brosur	1	Baik	Tersedia brosur yang dicetak warna serta dapat diambil oleh pengguna layanan PTSP
Papan Nama Petugas	5	Baik	Tersedia papan nama petugas PTSP yang disertai foto dan identitas
Papan Jam Layanan	1	Baik	Tersedia papan jam layanan petugas PTSP
Papan Jam Istirahat	1	Baik	Tersedia papan jam istirahat petugas PTSP

Sarana Penunjang PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Muara Enim dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan sudah didukung oleh sarana penunjang yang cukup memadai, diantaranya aplikasi antrian pengunjung, tv media center dan cctv. Dengan adanya sarana penunjang PTSP ini, diharapkan

Pengadilan Agama Muara Enim dapat menyelenggarakan pelayanan peradilan yang optimal dengan aman dan tertib.

Layanan Inti PTSP

Terdapat 4 (Empat) jenis layanan inti pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Muara Enim, yakni layanan informasi, layanan pendaftaran, layanan kasir, dan layanan produk pengadilan yang setiap jenis layanan tersebut pada loket meja layanan akan melayani berbagai keperluan, berikut uraiannya :

Gambar Daftar Layanan Inti PTSP

<p>Layanan Informasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E-Court / E-Litigasi 2. Perkara Gugatan Sederhana 3. Perkara Gugatan 4. Perkara Permohonan 5. Perkara Gugatan / Permohonan lainnya 6. Perkara Verzet 7. Perkara Derden Verzet 8. Permohonan Banding 9. Permohonan Kasasi 10. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) 11. Permohonan Pemeriksaan Setempat (Descente) 12. Permohonan Sita Jaminan 13. Permohonan Sita Eksekusi 	<p>Layanan Pendaftaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E-Court / E-Litigasi 2. Perkara Gugatan Sederhana 3. Perkara Gugatan 4. Perkara Permohonan 5. Perkara Gugatan / Permohonan lainnya 6. Perkara Verzet 7. Perkara Derden Verzet 8. Permohonan Banding 9. Permohonan Kasasi 10. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) 11. Permohonan Pemeriksaan Setempat (Descente) 12. Permohonan Sita Jaminan 13. Permohonan Sita Eksekusi
<p>Layanan Kasir :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembalian Sisa Panjar 2. Pembayaran PNBP Surat Kuasa 3. Pembayaran PNBP Salinan Putusan 4. Pembayaran PNBP Salinan Penetapan 5. Pembayaran PNBP Akta Cerai 6. Pembayaran PNBP Leges Salinan Putusan 7. Pembayaran PNBP Leges Salinan Penetapan 8. Pembayaran PNBP Leges Akta Cerai 	<p>Layanan Produk Pengadilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan Salinan Putusan 2. Pengambilan Salinan Penetapan 3. Pengambilan Akta Cerai 4. Pengambilan Leges Salinan Putusan 5. Pengambilan Leges Salinan Penetapan 6. Pengambilan Leges Akta Cerai 7. Pengambilan Buku Nikah (Pencabutan Perkara)

Layanan Pendukung PTSP

Terdapat 3 (Tiga) jenis layanan pendukung pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Muara Enim, yakni layanan bank, layanan posbakum, layanan pos yang setiap jenis layanan tersebut terintegrasi dengan PTSP.

Prosedur Layanan PTSP

Waktu operasional layanan PTSP sesuai dengan jam operasional kantor dan seluruh layanan dalam PTSP diberikan sesuai dengan prosedur baku.

<p>"SENIN - KAMIS" Waktu Layanan : 08:00 WIB - 16:30 WIB Waktu Istirahat : 12:00 WIB - 13:00 WIB</p>	<p>"JUM'AT" Waktu Layanan : 08:00 WIB - 17:00 WIB Waktu Istirahat : 11:30 WIB - 13:00 WIB</p>	<p>"SABTU DAN MINGGU" Tidak Ada Pelayanan "TANGGAL MERAH" Tidak Ada Pelayanan</p>
--	---	---

Performa Petugas PTSP

Petugas PTSP memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat, petugas PTSP memberikan pelayanan dengan ramah dan petugas PTSP menggunakan pakaian dinas atau seragam khusus dan mengenakan tanda pengenal



Inovasi Pelayanan Publik

Pengadilan Agama Muara Enim telah melaporkan beberapa inovasi pelayanan publik kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, melalui Surat Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Nomor W6-A5/75/KP.02.1/I/2020 tanggal 3 Januari 2020, tentang Penilaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan IV di Lingkungan Peradilan Agama. Adapun inovasi pelayanan publik tersebut diantaranya adalah Antrian PTSP.

Antrian PTSP merupakan aplikasi antrian bagi pengunjung yang hendak berurusan di ruang pelayanan terpadu satu pintu. Aplikasi ini berbasis web yang dijalankan pada sebuah server lokal dalam satu jaringan *local area network* (LAN). Dalam mengimplementasikan inovasi ini, dibutuhkan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan pengguna (*brainware*).

Kebutuhan perangkat keras untuk mengimplementasikan inovasi pelayanan publik berupa aplikasi antrian PTSP ini terdiri dari beberapa perangkat, yaitu :

Tabel Kebutuhan Perangkat Keras untuk Aplikasi Antrian PTSP

Nama Perangkat	Jumlah	Spesifikasi Minimum	Uraian Keperluan
Kios Touch Screen	1 Unit	OS Android, Layar Sentuh, LAN/Wifi, Speaker	Digunakan untuk mengambil nomor antrian pengunjung
All In One PC Desktop	4 Unit	OS Windows 10 64 Bit, DDR4 4GB, 500GB Hardisk, LAN/Wifi	Digunakan untuk petugas meja loket : 1. Informasi 2. Pendaftaran 3. Kasir 4. Produk Pengadilan
TV Led	1 Unit	Layar 32 Inchi, HDMI, Speaker	Digunakan untuk menampilkan nomor antrian yang sedang di panggil ke meja loket, dan sekaligus mengeluarkan suara pemanggilan nomor antrian
Printer Thermal	1 Unit	Support Windows, USB Port, Ukuran Kerta 58 mm	Digunakan untuk mencetak nomor antrian yang diambil oleh pengunjung

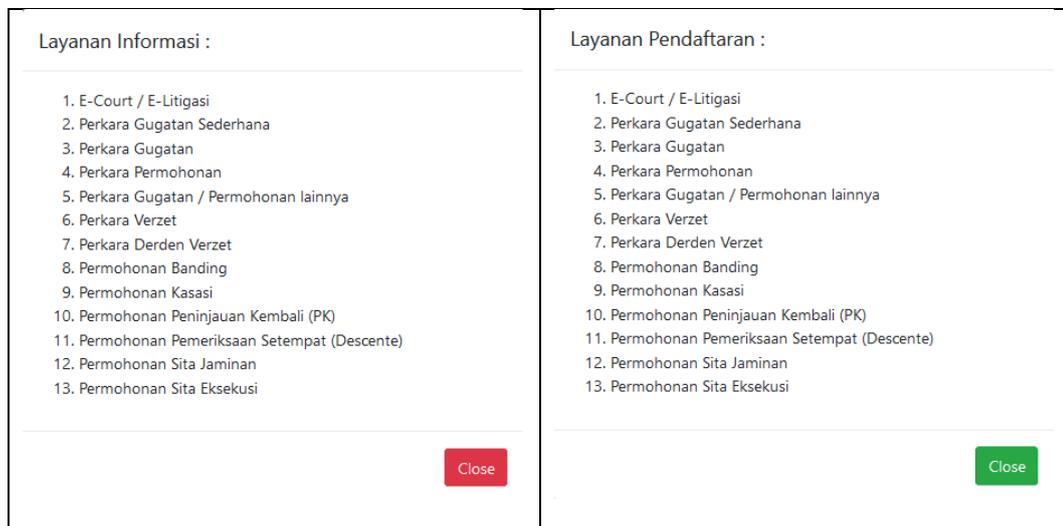
Gambar Tampilan Utama Aplikasi Antrian PTSP



Gambar Tampilan Locket Ambil Antrian Aplikasi Antrian PTSP



Gambar Tampilan Jenis Layanan yang Disediakan Aplikasi Antrian PTSP



<p>Layanan Kasir :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembalian Sisa Panjar 2. Pembayaran PNBP Surat Kuasa 3. Pembayaran PNBP Salinan Putusan 4. Pembayaran PNBP Salinan Penetapan 5. Pembayaran PNBP Akta Cerai 6. Pembayaran PNBP Leges Salinan Putusan 7. Pembayaran PNBP Leges Salinan Penetapan 8. Pembayaran PNBP Leges Akta Cerai <p style="text-align: right;">Close</p>	<p>Layanan Produk Pengadilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan Salinan Putusan 2. Pengambilan Salinan Penetapan 3. Pengambilan Akta Cerai 4. Pengambilan Leges Salinan Putusan 5. Pengambilan Leges Salinan Penetapan 6. Pengambilan Leges Akta Cerai 7. Pengambilan Buku Nikah (Pencabutan Perkara) <p style="text-align: right;">Close</p>
--	---

Gambar Tampilan Layar Panggil Aplikasi Antrian PTSP

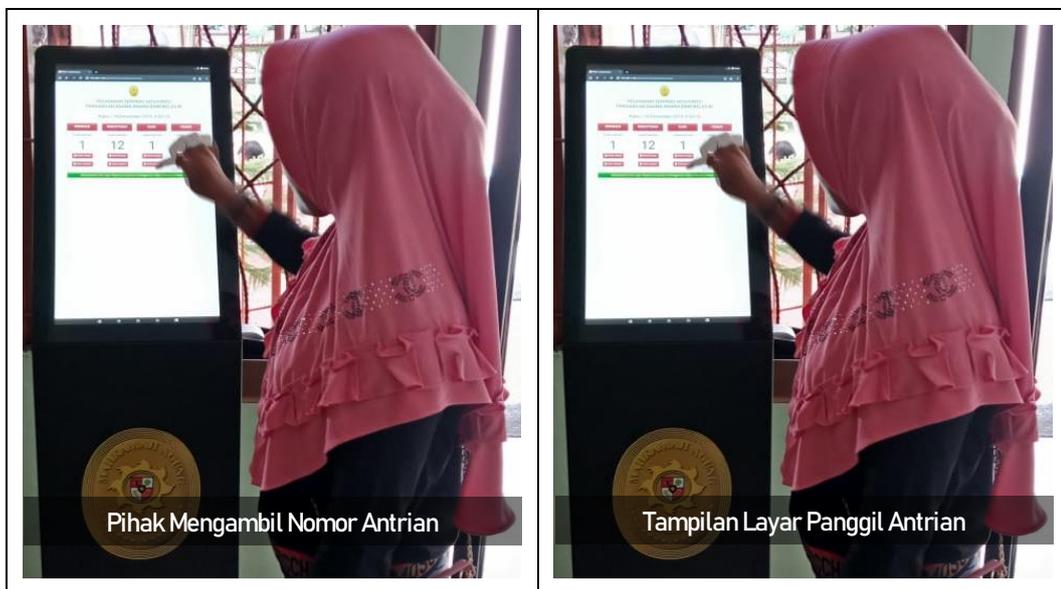


Gambar Tampilan Meja Loker Aplikasi Antrian PTSP



Inovasi pelayanan publik antrian PTSP ini dibuat dan dikembangkan sendiri oleh Pengadilan Agama Muara Enim. Penyelesaian pekerjaan pembuatan aplikasi ini yaitu pada tanggal 3 September 2019 dan telah diimplementasikan secara utuh pada awal Oktober 2019, kemudian sampai sekarang aplikasi antrian PTSP ini masih berjalan dengan baik dan dapat digunakan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama Muara Enim. Aplikasi ini dinilai sangat bermanfaat dalam menertibkan pelayanan informasi, pendaftaran, kasir, dan produk pengadilan di ruang PTSP.

Gambar Para Pihak Mengambil Antrian Layanan PTSP



Selain dari inovasi pelayanan publik yang dikembangkan sendiri, Pengadilan Agama Muara Enim juga mengimplementasikan 9 (Sembilan) Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok, sebagaimana Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3396/DjA/OT.02.1/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019. Sembilan Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama tersebut telah di instal dan diuji coba dan berjalan dengan baik. Berikut ini gambaran hasil implementasi pelaksanaannya :

9 (Sembilan) Aplikasi Unggulan Dirjen Badilag



1. Aplikasi Notifikasi Perkara

Pengadilan adalah lembaga yang terbuka untuk semua kalangan, namun seringkali masyarakat yang datang ke pengadilan adalah masyarakat awam yang baru pertama kali datang ke pengadilan, jangankan mengerti persoalan hukum, persoalan administrasi di pengadilan pun terkadang membuat bingung. Bagaimana proses yang harus dijalani, apa yang harus disiapkan, berapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara.

Proses berperkara di persidangan memang harus melewati tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan, dari tahapan administrasi sampai tahapan persidangan. Para pihak sering kali bingung atau mungkin tidak tahu apa yang mesti dilakukan setelah melewati satu proses, sehingga dibutuhkan satu cara atau terobosan untuk bisa mengingatkan para pihak bahwa proses perkara yang dijalannya sudah sampai tahapan apa. Hal ini akan memudahkan pihak yang berperkara untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan baik.

Aplikasi notifikasi perkara ini merupakan hal sederhana yang bisa diterapkan secara nasional, meskipun bukan sesuatu yang sama sekali baru, karena di beberapa pengadilan juga sudah menerapkannya, namun untuk diterapkan secara menyeluruh di semua pengadilan agama tingkat pertama belum pernah dilakukan. Inilah yang mendorong Ditjen Badilag untuk mengembangkan sistem aplikasi ini.

Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, baik itu pihak prinsipal dalam suatu perkara maupun Kuasa Hukumnya.

Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersumber dari data kependudukan dan nomor perkara, sehingga notifikasi yang diberikan dapat terkelompok dan tepat sasaran kepada pihak berperkara.

Gambar Tampilan Balasan Notifikasi SMS



Gambar Banner / Brosur SMS Notifikasi Perkara



Fungsi Aplikasi :

1. Memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak, yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara.
2. Bersifat aktif (sistem memberikan notifikasi secara kontinyu).

2. Aplikasi Informasi Produk dan Perkara

Berkaitan dengan aplikasi notifikasi perkara, aplikasi ini bersifat informatif dan lebih umum, mungkin fungsinya seperti website yang memuat segala informasi mengenai suatu pengadilan, namun sifatnya lebih aktif dan personal kepada pengguna pengadilan. Aplikasi ini akan berguna untuk mendekatkan pengadilan kepada masyarakat, menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti makelar perkara dan pungutan liar.

Aplikasi ini merupakan suatu aplikasi yang terintegrasi dengan data SIPP, memberikan informasi kepada pihak berperkara atau masyarakat secara real time dan ter-update mengenai layanan dan produk pengadilan.

Gambar Tampilan Aplikasi Informasi dan Produk Perkara

The screenshot displays the 'A.C.O. Integrated System' interface. It features a sidebar with navigation icons and a main content area. The main area is divided into two sections: 'Data Umum' and 'Keuangan Perkara'. The 'Data Umum' section contains a table with the following details:

Nomor Perkara	1059/Pdt.G/2019/PA/ME
Jenis Perkara	Cerai Gugat
Tanggal Pendaftaran	20 November 2019
Penggugat	Henti Pusta Sari binti Harmudin Jalan Pertamina, Desa Babat, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir(PALJ)
Tergugat	Firmanoyah bin H.Amin Dusun I, Desa Parun, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir(PALJ)

The 'Keuangan Perkara' section contains a table with the following data:

Tanggal	Uraian	Kredit	Debet	Saldo
20 November 2019	Panjar Biaya Perkara	1171000	0	1171000
20 November 2019	Biaya Pendaftaran/PNBP	0	30000	1141000
20 November 2019	Biaya Pemberkasari/ATK	0	50000	1091000
Jumlah		1171000	80000	1091000

Fungsi Aplikasi : Memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak

3. Aplikasi Antrian Sidang

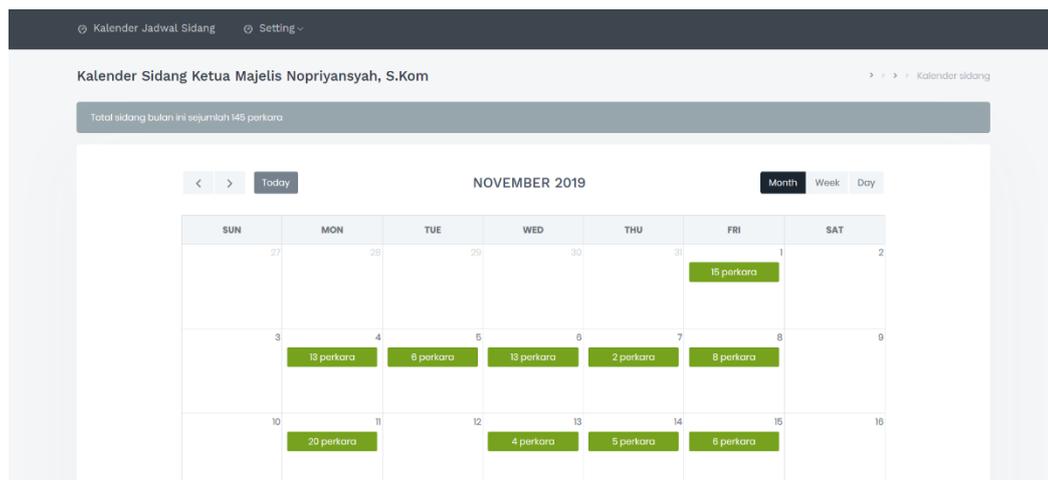
Pengadilan Agama adalah salah satu pengadilan yang menangani perkara dengan volume yang sangat tinggi/overload, mengingat banyaknya jumlah perkara yang disidangkan setiap harinya, khususnya di pulau jawa.

Selain itu, terbatasnya jumlah hakim dan jumlah ruang sidang mengakibatkan persidangan harus dilakukan secara bergantian, yang pada akhirnya mengakibatkan masa tunggu untuk mengikuti sidang menjadi cukup lama.

Sudah lazim diketahui, sebaran jumlah perkara di berbagai wilayah sangatlah variatif, ini sangat tergantung kepada padatnya jumlah penduduk dan jumlah penduduk muslim yang ada di suatu daerah.

Aplikasi Antrean sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan pembagian jadwal persidangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran antrean secara online sehingga dapat mengatur waktu persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrean panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan.

Gambar Tampilan Aplikasi Antrian Sidang online



Fungsi Aplikasi :

1. Menyediakan pendaftaran antrean secara online.
2. Memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sesuai dengan kebutuhannya.

4. Aplikasi Data Kemiskinan

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan mengatur tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Pembebasan Biaya Perkara; Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pos Pelayanan Hukum di Pengadilan. Pembebasan biaya perkara artinya para pencari keadilan yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma melalui anggaran DIPA yang diberikan oleh negara.

Kemudahan yang diberikan Perma 1/2014 ternyata menyisakan sedikit persoalan dalam pelaksanaannya. Pembebasan biaya perkara yang sudah dianggarkan pada suatu pengadilan tidak terserap dengan baik, disebabkan sulitnya masyarakat untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) dari kelurahan atau surat sejenisnya yang diperlukan, bahkan untuk pembuatan surat tersebut seringkali membutuhkan lebih banyak waktu dan juga biaya.

Ditjen Badilag telah membuat aplikasi verifikasi data kemiskinan, aplikasi ini nantinya dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan, pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui nomor induk kependudukannya.

Gambar Tampilan Aplikasi Data Kemiskinan

The screenshot displays the SIMTALAK application interface. At the top, there is a green header with the SIMTALAK logo and navigation icons. Below the header, there are tabs for 'Dashboard' and 'Prodeo'. The main content area is titled 'Prodeo' and shows a search form for 'Penduduk Miskin'. The search criteria include 'Nomor Induk Kependudukan' (1603024108840002) and a search button labeled 'CARI'. Below the search form, a table displays the search results for 'Ema Kasmira'. The table has columns for 'Nama', 'Tempat Lahir', 'Tanggal Lahir', 'Jenis Kelamin', and 'Alamat'. The search results show 'Ema Kasmira' with 'Perempuan' as the gender and 'Jl Letnan Idris Basim Rt 03 Rw 02' as the address. A 'CETAK' button is located at the bottom left of the search results table. The footer of the application shows 'Copyright © 2016 TIM IT Ditjen Badilag'.

Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Alamat
Ema Kasmira			Perempuan	Jl Letnan Idris Basim Rt 03 Rw 02

Gambar Tampilan Hasil Cetak Aplikasi Data Kemiskinan

DATA PENDUDUK MISKIN BASIS DATA TERPADU TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)	
NIK	1603024108840002
Nama	Ema Kasmira
Tempat / Tanggal Lahir	/
Jenis Kelamin	Perempuan
Alamat	Jl Letnan Idris Basin Rt 03 Rw 02
Nomor Kartu Program Keluarga Harapan	
Nomor Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/ Kartu Perlindungan Sosial (KPS)	
Nomor Kartu Penerima Bantuan Iuran BPJS	

Data tersebut di atas dicetak melalui Aplikasi Basis Data Terpadu Daftar Penduduk Miskin pada Ditjen Badan Peradilan Agama di laman <https://simtalak.badilag.net> bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk kepentingan beracara secara prodeo pada Pengadilan Agama Muara Enim.

Dicetak di _____
Pada tanggal 16 Oktober 2019
Petugas Cetak

(_____)
NIP. _____

5. Aplikasi Command Center

Untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan agama baik tingkat pertama maupun banding, Ditjen Badilag selalu membuat program kerja yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di pengadilan agama baik itu teknis yudisial maupun non teknis yudisial baik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

Banyaknya jumlah satuan kerja dan jumlah pegawai di lingkungan peradilan agama menyebabkan kebutuhan tenaga dan biaya pembinaan menjadi besar, hal ini berimplikasi pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan bimbingan dan monitoring terhadap seluruh hakim dan aparat peradilan jika hal ini dilakukan dengan cara konvensional.

Perlu dicari cara agar koordinasi antara pusat dan daerah bisa berjalan dengan baik, berbiaya murah, cakupan wilayah dan peserta yang lebih banyak, dan hasil yang lebih maksimal.

Command Center bukan merupakan hal yang baru, bahkan di beberapa negara maju penggunaannya adalah hal yang lazim. Namun pemanfaatannya untuk lembaga peradilan masih belum masif digunakan. Luasnya wilayah dengan kondisi geografis yang rumit di Indonesia menjadikan hal ini sebagai suatu terobosan yang patut untuk diaplikasikan secepatnya.

Ditjen Badilag sedang mengembangkan Command Center Badilag yang mempunyai fungsi tidak hanya untuk pembinaan dan pengawasan, namun juga fungsi-fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama dan menciptakan iklim koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja.

Gambar Tampilan Aplikasi Command Center



Fungsi Aplikasi

1. Pusat kontrol data manajemen peradilan agama seluruh Indonesia, mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus.
2. Pusat Pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara virtual dan real time.
3. Pusat pengembangan E Learning.
4. Pusat pengembangan aplikasi manajemen, terdiri dari berbagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan tupoksi peradilan agama.
5. Sarana konsultasi dan bantuan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tupoksi tenaga teknis dan non-teknis pengadilan agama di seluruh Indonesia.

6. Aplikasi PNBP Fungsional

Ada persoalan yang beberapa tahun belakangan belum bisa ditemukan solusinya. Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Fungsional) dalam proses penerimaan perkara di pengadilan tidak bisa diidentifikasi secara rinci, sehingga mengakibatkan pelaporan PNBP Fungsional Keuangan perkara terkait jumlah dan waktu tidak akurat. Hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius.

Ditjen Badilag mengembangkan aplikasi yang diharapkan bisa mengatasi persoalan ini, aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBP Fungsional perkara seluruh pengadilan agama secara terpusat, Penyetoran PNBP Fungsional tepat waktu dan lengkap, yang mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, sebagai sarana informasi jumlah perkara yang belum disetor PNBP Fungsional pada tahun berjalan.

Gambar Tampilan Aplikasi PNBP Fungsional



The screenshot displays the 'BUKU PENERIMAAN HAK HAK KEPANITERAAN (PNBP)' interface. It includes a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Transaksi', 'Pendaftaran', 'Input Billing', 'KISA', and 'Manual Book'. The main area shows a table with columns for 'Tanggal', 'Uraian', 'No Bukti', and 'Biaya Pendaftaran' (subdivided into 'Tingkat Pertama', 'Tingkat Banding', 'Tingkat Kasasi', and 'Peninjauan Kembali'), 'Biaya Redaksi', 'Jumlah', and 'Keterangan'. A 'Cetak' button is visible above the table.

Tanggal	Uraian	No Bukti	Biaya Pendaftaran				Biaya Redaksi	Jumlah	Keterangan
			Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Kasasi	Peninjauan Kembali			
1	2	3	C2	C1	A1	A2	E2	9	10
16 Oktober 2019	467/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	10.000,00,-	
16 Oktober 2019	676/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	20.000,00,-	
16 Oktober 2019	875/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	30.000,00,-	
16 Oktober 2019	881/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	40.000,00,-	
16 Oktober 2019	883/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	50.000,00,-	
16 Oktober 2019	885/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	60.000,00,-	
16 Oktober 2019	886/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	70.000,00,-	
16 Oktober 2019	888/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	80.000,00,-	

Fungsi Aplikasi

1. Pencatatan PNBP Fungsional secara lengkap, mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara.

2. Sebagai sarana informasi jumlah perkara yang belum disetorkan PNBPFungsional ke Kas Negara pada tahun berjalan.
3. Pengukuran kinerja kasir dan bendahara penerimaan.

7. Aplikasi E-Eksaminasi

Saat ini belum ada mekanisme untuk mengetahui kualitas putusan hakim, biasanya untuk mengetahui kualitas putusan hakim dalam jumlah banyak hanya bisa dilakukan dengan cara penelitian yang membutuhkan waktu lama, biaya yang banyak, dan hasilnya pun masih sangat terbatas. Dengan kuantitas satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia yang cukup besar (412 pengadilan tingkat pertama, 29 Satker tingkat banding) dengan banyaknya jumlah hakim menjadi tantangan tersendiri bagi Ditjen Badilag untuk memetakan kualitas putusan dan berkas perkara serta kemampuan teknis administrasi yustisial hakim peradilan agama di Indonesia.

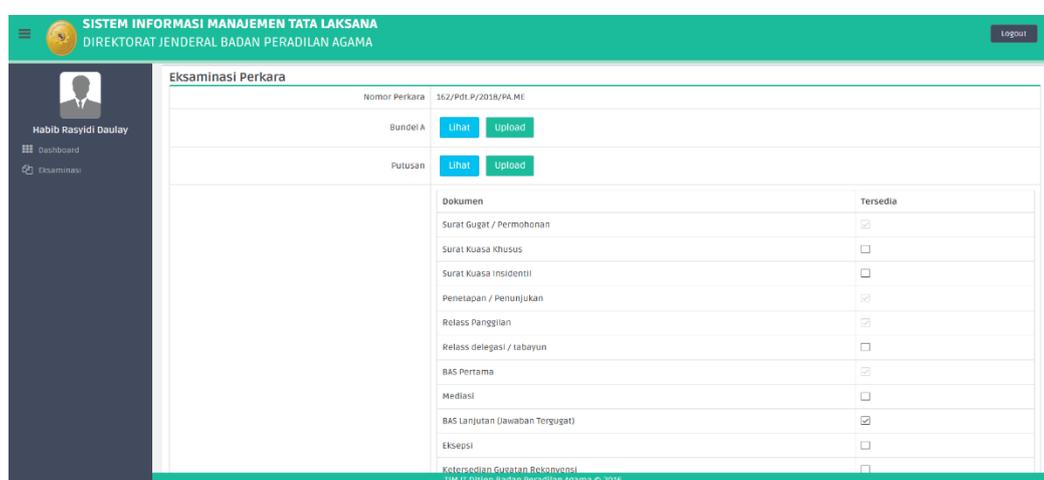
Selama ini, terdapat kendala yang dialami Ditjen Badilag ketika ingin mengetahui dan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas putusan hakim, karena ketidakterediaan data kualitatif yang seharusnya dapat dikuantitatifkan tersebut. Meskipun MA sudah mempunyai basis data putusan pengadilan dalam Direktori Putusan, namun belum punya mekanisme dalam mengolah data tersebut menjadi suatu penilaian kualitatif. Ditjen Badilag akan melakukan eksaminasi silang terhadap putusan hakim tingkat pertama, dimana putusan hakim tingkat pertama akan dieksaminasi oleh 3 (tiga) hakim tinggi yang bertugas di wilayah hukum pengadilan tinggi agama yang berbeda.

Aplikasi ini akan menghimpun putusan hakim tingkat pertama melalui Direktori Putusan, kemudian setiap putusan akan dicek kelengkapan data perkaranya melalui aplikasi SIPP, kemudian dieksaminasi oleh tiga orang hakim tinggi di wilayah hukum pengadilan tinggi agama yang berbeda, proses ini dilakukan secara anonim, artinya hakim tingkat pertama yang dieksaminasi tidak mengetahui siapa yang melakukan eksaminasi, hal ini untuk menjaga objektivitas proses eksaminasi.

Aplikasi ini adalah sebuah sistem evaluasi dan penilaian secara elektronik terhadap penerapan hukum formil dan materil oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

E-Eksaminasi merupakan sistem yang dapat memberikan informasi dan pemetaan terhadap kompetensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga dapat digunakan sebagai data awal dalam rencana pengembangan kebijakan, diklat, serta promosi dan mutasi.

Gambar Tampilan Aplikasi E-Eksaminasi



Fungsi Aplikasi

1. Untuk meningkatkan profesionalisme hakim, baik segi teknis yuridis maupun administrasi perkara.
2. Mendapatkan bahan masukan berupa fakta dan data pelaksanaan hukum materil dan formil oleh Hakim dalam memutuskan suatu perkara.
3. Mendorong Hakim untuk meningkatkan integritas, kredibilitas, dan profesionalisme dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
4. Mendapatkan bahan pemetaan kompetensi dan pemerataan komposisi Hakim di peradilan agama.
5. Mendapatkan bahan pembinaan yang lebih tepat sasaran guna penyusunan perencanaan peningkatan kompetensi Hakim dalam bentuk bimbingan teknis dan pendidikan serta pelatihan.

8. E-Register

Bahwa yang dimaksud dengan e-Register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Ketua Pengadilan bertanggung jawab penuh dalam melakukan monitoring dan evaluasi setiap hari kerja, paling lambat satu jam sebelum jam kerja berakhir guna memastikan seluruh data perkara dan data keuangan perkara pada hari tersebut telah diinput ke dalam aplikasi SIPP secara tepat dan benar.

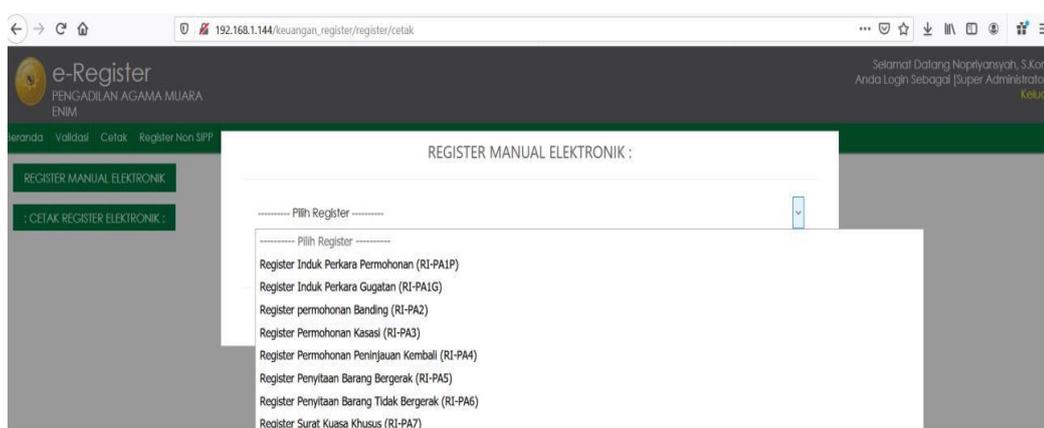
Data perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Pengadilan harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat waktu berupa softcopy apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atau eksternal.

Oleh karena itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama membangun aplikasi e-Register yang dapat dipergunakan untuk mendukung kinerja peradilan agama dalam mengumpulkan dan menyajikan data perkara secara elektronik.

Aplikasi e-Register mempunyai beberapa menu utama, yaitu menu Validasi, Cetak dan Register Non SIPP.

Gambar Tampilan Aplikasi E-Register



Fungsi Aplikasi :

1. Sebagai salah satu sarana validasi data SIPP satuan kerja.
2. Sarana pencetakan buku-buku register sesuai pola bindalmin.

9. E-Keuangan

Administrasi Keuangan Perkara secara elektronik (e-keuangan perkara) merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi keuangan perkara di pengadilan, untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara efektif, efisien, dan modern, sekaligus bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

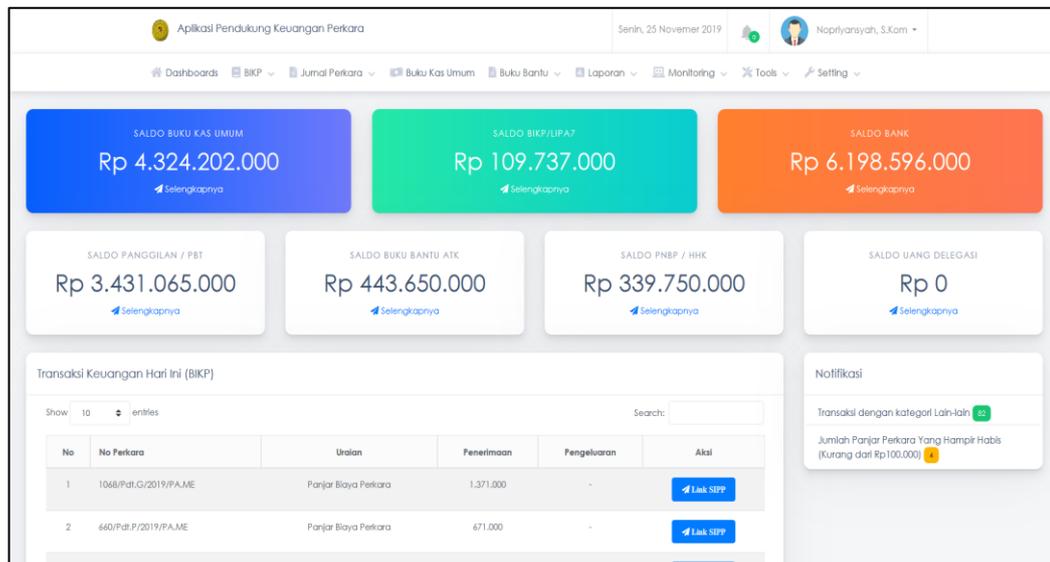
Aplikasi keuangan perkara merupakan aplikasi pendukung SIPP yang mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II). Aplikasi ini digunakan untuk memonitor dan mencetak laporan keuangan perkara meliputi:

- a. Buku Jurnal Perkara Gugatan (KI-PA1/G)
- b. Buku jurnal perkara permohonan (KI-PA1/P)
- c. Buku jurnal permohonan banding (KI-PA2)
- d. Buku jurnal permohonan kasasi (KI-PA3)
- e. Buku jurnal permohonan peninjauan kembali (KI-PA4)
- f. Buku jurnal permohonan eksekusi (KI-PA5)
- g. Buku induk keuangan perkara (KI-PA6)
- h. Buku keuangan biaya eksekusi (KI-PA7)
- i. Buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan (KI-PA8a)
- j. Buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan lainnya (KI-PA8b)

Hasil cetak buku induk keuangan perkara pada aplikasi ini, dibagi menjadi tiga versi, meliputi:

- Versi bindalmin, yaitu hasil cetaknya sama persis Buku Induk Keuangan Perkara pada umumnya.
- Versi ringkas, di mana kolom-kolom dalam Buku Induk Keuangan Perkara lebih ringkas menyesuaikan transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara.
- Versi rekap, yaitu hasilnya dikelompokkan berdasarkan nomor perkara. Penerapan aplikasi keuangan perkara di lingkungan peradilan agama diatur dalam Surat Dirjen Badilag Nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019, tanggal 11 Februari 2019, hal Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik pada Peradilan Agama dan Surat Dirjen Badilag Nomor 0956/DJA/HM.02.3/III/2019, tanggal 18 Maret 2019 hal Penggunaan Aplikasi Pendukung SIPP untuk memonitor dan mencetak laporan keuangan perkara.

Gambar Tampilan Aplikasi E-Keuangan



Fungsi Aplikasi

- Sebagai salah satu sarana validasi data keuangan perkara.
- Sebagai sarana pencetakan buku-buku keuangan perkara.
- Sebagai sarana melakukan pelaporan keuangan perkara.

Bab VI

Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar setiap tugas yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dari sekian bentuk pengawasan, maka pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan itu sendiri.

Landasan hukum pelaksanaan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Agama Muara Enim yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- 4) Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 001/SK/11/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama.
- 5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/006/SK/III/1994, tanggal 31 Maret 1994, tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
- 6) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- 7) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
- 8) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006, tanggal 19 Oktober 2006, tentang Tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Pengawasan.

- 9) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007, tanggal 24 Agustus 2007, tentang Pemberlakuan Buku I.
- 10) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007, tanggal 29 Agustus 2007, tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan.

Dalam membantu pimpinan melakukan pengawasan di bidang perkara dan kelancaran tugas kesekretariatan untuk tahun 2019, Ketua Pengadilan Agama Muara Enim menunjuk/menetapkan susunan Hakim Pengawas Bidang, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor W6-A5/48/PS.00/I/2019, tanggal 2 Januari 2019, kemudian sehubungan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 174/KMA/SK/VI/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Mutasi Hakim Pengadilan Agama dari Hakim Mahkamah Syariah Sigli Kelas IB menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB, maka dipandang perlu memperbaharui koordinator Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Muara Enim, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Susunan Hakim Pengawas Bidang

Nama	Jabatan	Bidang Pengawasan
Drs. H. Husaini, S.H., M.H. 196812191994031001	Wakil Ketua Hakim Madya Utama	Koordinator Pengawas Bidang
H. Tamim, S.H. 196407291988021001	Hakim Madya Utama	Manajemen Peradilan
Drs. Riskullah, S.H. 195609181984021002	Hakim Utama Muda	Administrasi Perkara
Hj. Sabariah, S.Ag., M.H. 196903061997032004	Hakim Madya Muda	Administrasi Persidangan
Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy. 198309182007041001	Hakim Pratama Utama	Administrasi Umum
Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I., M.H. 198104032007041001	Hakim Pratama Utama	Pengelolaan IT dan SIPP
Weri Siswanto BAD, S.H.I. 198204252009121003	Hakim Pratama Madya	Kinerja Pelayanan Publik

A. Internal

Pengawasan internal oleh Pengadilan Agama Muara Enim dilakukan dengan 1 (satu) sistem pengawasan, yaitu pengawasan langsung ke objek dan telah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Pengawasan internal dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pengawasan Melekat (Waskat)

Pengawasan dari atasan langsung terhadap bawahannya, baik secara preventif maupun represif, agar pelaksanaan tugas bawahan itu berjalan sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan secara rutin setiap bulan dan secara berkala, di samping itu juga dilakukan dengan cara mengadakan rapat-rapat rutin / berkala, rapat pimpinan dan musyawarah setiap permasalahan yang timbul serta mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas pokok peradilan.

Hakim Pengawasan Bidang (Hawasbid)

Hakim Pengawasan Bidang melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala 1 x dalam 1 bulan atau 12 kali dalam satu tahun sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, dan setelah melakukan pengawasan setiap hakim pengawas bidang menyampaikan laporannya secara berkala 1x3 bulan kepada Ketua melalui Wakil Ketua (Koordinator Pengawas) untuk ditindak lanjuti.

Ketua Pengadilan membuat laporan tidak lanjut atas penemuan penemuan dari hakim pengawas bidang tersebut setelah hal tersebut di tindaklanjuti.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan meliputi bidang :

1. Bidang Manajemen Peradilan
 - Pembinaan sumber daya manusia.
 - Tertib perkantoran dan rumah tangga.
 - Program kerja dan *job descriptions* pegawai.
 - Ketertiban tata kelola persuratan dan pengarsipannya.
 - Penatausahaan dan pengelolaan perpustakaan.
2. Bidang Kinerja Pelayanan Publik
 - Penataan meja informasi dan petugas-petugasnya.
 - Kecepatan dan ketepatan pelayanan baik dalam permintaan informasi perkara, program kerja, fatwa, dan lainnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pengadilan.
 - Penanganan dan tindak lanjut pelaporan dari masyarakat.

- Ketertiban pembukuan keuangan perkara dalam register Induk Keuangan Perkara, buku jurnal, dan buku bendahara.
 - Laporan keuangan perkara setiap bulannya dan laporan penerimaan serta pengeluaran PNBP.
 - Ketertiban pembukuan biaya proses.
 - Realisasi keuangan biaya prodeo dan posbakum.
3. Bidang Administrasi Persidangan
- Prosedur pendaftaran perkara gugatan, permohonan, *verzet*, *derden verzet*.
 - Prosedur pendaftaran *Isbat Rukyah Hilal*.
 - Prosedur pemanggilan dan pemberitahuan.
 - Pembuatan Berita Acara Sidang.
 - Proses pemeriksaan dan putusan.
 - Tertib persidangan.
 - Prosedur pendaftaran banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
 - Ketepatan pengiriman berkas perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
 - Proses pelaksanaan eksekusi, sita, dan pelelangan umum.
4. Bidang Administrasi Perkara
- Ketepatan waktu minutasi.
 - Ketepatan waktu pelapor perkara.
 - Ketertiban pembuatan laporan perkara sesuai pola BINDALMIN.
 - Ketertiban penyimpanan arsip pada para perkara.
 - Ketertiban penyimpanan berkas minutasi dan arsip pelaporan perkara.
 - Ketertiban penatausahaan arsip perkara.
 - Penulisan data perkara ke dalam buku register perkara.
 - Penulisan data mediasi ke dalam buku register mediasi.
 - Ketertiban penyimpanan dokumen register perkara.
 - Ketertiban penulisan ke dalam semua buku register perkara.
5. Bidang Pengelolaan IT dan SIPP
- *Up date* data/informasi kedalam website.

- Backup database perkara pada SIPP.
- Backup database lain aplikasi pendukung SIPP
- Maintenance jaringan internet dan LAN;
- Maintenance SIPP
- Maintenance Website
- Maintenance Antrian PTSP
- Maintenance perangkat teleconference, kios *touch screen*, TV media, CCTV dan server.

6. Bidang Umum

- Tingkat kesejahteraan pegawai seperti kenaikan pangkat, KGB, dan hak-hak pegawai lainnya.
- Tingkatkan kedisiplinan pegawai / absensi.
- Penghargaan dan hukuman pegawai.
- Ketertiban dalam administrasi Barang Milik Negara (BMN) dan pemeliharannya.
- Kebersihan dan keasrian kantor dan lingkungannya.
- Ketertiban pengelolaan parkir.
- Ketertiban pembukuan keuangan DIPA.
- Realisasi keuangan DIPA.
- Laporan keuangan DIPA.
- Laporan Pajak tahunan untuk semua pegawai.

Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah PTA Palembang

Selama tahun 2019, Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak turun melakukan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Muara Enim, namun *Lead Assessor*, Drs. H. Abdullah, S.H., M.H., datang dengan didampingi oleh tiga orang asesor pendamping, diantaranya Hj. Fara Umitha, S.H., Miftah Nurul Anwar, S.H., M.H., dan Arpita Pitriyanti, S.H., datang selaku *Assessor Eksternal* untuk melakukan *Assessment Surveillance* Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Agama Muara Enim.

Setelah kegiatan *assessment surveillance pertama* Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Muara Enim yang dilaksanakan pada tanggal 17-19 Juni 2019 itu pun selesai, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak lagi menugaskan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah ke Pengadilan Agama Muara Enim, tetapi ke Pengadilan Agama yang tidak melakukan *assessment eksternal* atau *assessment surveillance*.

B. Evaluasi

Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Muara Enim telah melaksanakan pengawasan regular terhadap pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Muara Enim, dan evaluasi hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan di Pengadilan Agama Muara Enim baik dibidang kesekretariatan maupun dibidang kepaniteraan, yaitu :

1. Evaluasi dibidang kepaniteraan khususnya pengawasan dan pembinaan dibidang perkara guna untuk meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Enim. Evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dan mengatasi kendala dalam pengisian register perkara.
2. Evaluasi dibidang kesekretariatan khususnya pengawasan dan pembinaan pada bagian umum, kepegawaian dan keuangan.
3. Mengacu pada Buku IV Mahkamah Agung tentang tata laksana pengawasan peradilan yang meliputi pengawasan dan pembinaan secara rutin dan regular, pemeriksaan keuangan dan penanganan pengaduan.

Semua hasil dari pengawasan yang dilakukan baik oleh Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pengadilan Agama Muara Enim maupun Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Hatibinwasda) Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah ditindak lanjuti secara keseluruhan disegala bidang objek pemeriksaan oleh unsur pimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.

Bab VII

Penutup

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara yang ditangani tahun 2019 mencapai 100% yakni putus sebanyak 1.837 perkara, dimana jumlah perkara yang ditangani tersebut merupakan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 26 perkara dan perkara diterima tahun 2018 sebanyak 1.811 perkara. Dari jumlah tersebut sisa perkara Pengadilan Agama Muara Enim sebanyak 0 perkara (zero).
2. Pelaksanaan mediasi belum begitu optimal di Pengadilan Agama Muara Enim, sehingga dari 141 perkara yang dimediasi hanya sebanyak 6 perkara yang berhasil mediasi dengan perdamaian, sedangkan sisanya sebanyak 141 perkara tidak berhasil.
3. Anggaran DIPA (01) sebesar Rp 4.306.888.000 (empat milyar tiga ratus enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 4.280.980.216 (empat milyar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus enam belas rupiah), jumlah tersebut mencapai **99,4%** dengan sisa anggaran sebesar Rp 25.907.784 (dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), yakni 0,6%.
4. Anggaran DIPA (04) sebesar Rp 73.750.000 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 73.750.000 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah tersebut mencapai **100%** dengan sisa anggaran sebesar Rp 0 (nol rupiah), yakni 0%.
5. Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan bagi pejabat Eselon III dan Eselon IV belum terlaksana secara merata dimana pada tahun 2019 hanya Sekretaris Pengadilan Agama Muara Enim yang baru mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III, sedangkan Kepala Sub Bagian masih belum ada yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV.

6. Diklat Tenaga Teknis Peradilan tidak ada pada tahun 2019, padahal hal ini sangatlah dibutuhkan sekali oleh SDM Tenaga Teknis untuk meningkatkan kompetensinya dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis yustisial.
7. Sarana dan prasarana fasilitas perkantoran belum begitu memadai, seperti AC, Printer, TV Media dan Meubelair, dimana kondisinya sebagian besar sudah rusak ringan sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup besar.

B. Rekomendasi

1. Untuk lebih efektifnya pelaksanaan mediasi perlu adanya pelatihan mediator bagi para hakim secara merata.
2. Untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan perlu secara terus menerus dilaksanakan pelatihan dan peningkatan ketrampilan, untuk itu perlu dilakukan pengusulan diklat terhadap SDM Teknis dan Non Teknis.
3. Untuk peningkatan sarana dan prasarana apartur Pengadilan Agama Muara Enim perlu dilakukan perencanaan dan usul yang matang terhadap penyusunan anggaran belanja satuan kerja Pengadilan Agama Muara Enim (RKA-KL)



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR W6-A5/1468/HM.02.1/XII/2019**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengevaluasi kegiatan dan menyusun langkah-langkah kinerja pada tahun berikutnya, maka dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Tahunan 2019 Pengadilan Agama Muara Enim.
b. Bahwa Tim Penyusun Laporan Tahunan 2019 Pengadilan Agama Muara Enim dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Tim Penyusun Laporan Tahunan 2019 Pengadilan Agama Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 1989 tentang peradilan Agama
4. Perma Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan 2019 Pengadilan Agama Muara Enim.
Kedua : Kepada yang nama-namanya ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, disiplin, tertib dan tanggung jawab.
Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 3 Desember 2019
Ketua,



Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
NIP. 19660930.199403.1.002

Tembusan:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Daftar Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
Nomor : W6-5/1468/HM.02.1/XII/2019
Tanggal : 3 Desember 2019

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan/ ruang	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H. NIP 19690930.199403.1.002	Pembina Utama Muda IV/c	Ketua	Penanggung Jawab
	Syam Ratulangi, S.H. NIP 19640106.20011.2.1001	Pembina IV/a	Sekretaris	Pengarah
3.	Edy Syafiq, S.H. NIP 19651026.198703. 1.001	Pembina IV/a	Panitera	Pengarah
2.	Karbudin, S.Ag NIP 19691126.199703. 1.003	Penata Tingkat I III/d	Panitera Muda Hukum	Ketua Tim
	Azuardi Rizal, S.S.I. NIP 19841115.200912.1.004	Penata Muda Tingkat I III/b	Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan	Koordinator Kesekretariatan
5.	Yeni Puspita, S.Ag NIP 19730705. 200312.2.005	Penata Tingkat I III/d	Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana	Anggota
4.	Rahmi Oktaria, S.H.I NIP 19801007.201101.2.005	Penata III/c	Kasubbag Umum dan keuangan	Anggota
6.	Rendy A., S.H.I NIP 19850927.200912.1.003	Penata Muda Tingkat I III/b	Panitera Muda Gugatan	Koordinator Kepaniteraan
7.	Firdaus, S.H.I. NIP 19861118.201101.1.008	Penata III/c	Panitera Pengganti	Anggota
8.	Leni Pebriati, S.H.I. NIP 19840131.200904.2.006	Penata III/c	Panitera Pengganti	Anggota
9.	Zayan Rohanda. S.H. NIP 19751214.200904.1.001	Penata III/c	Staf Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
11.	Ary Puspita Yudha, S.T. NIP 19870914. 201503. 2.002	Penata Muda Tingkat I III/b	Staf Perencanaan TI dan Pelaporan	Anggota



Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 3 Desember 2019
Ketua

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
NIP 19660930.199403.1.002

Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB



Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas SH No. 1
Muara Enim - 31312



(0734) 7420107, 7420108



pa.muaraenim@gmail.com

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

